



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI, KOMPETENSI  
APARAT PEMERINTAH, DAN KEPATUHAN REGULASI  
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
( Studi Empiris pada OPD Tahun 2016 di Kab.Bengkalis )**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**LEVI SAVILA  
NIM: 11770323444**



**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Levi Savila  
 Nim : 11770323444  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Program Studi : S1 Akuntansi  
 Judul : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Dan Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( Studi Empiris Pada Opd Tahun 2016 Di Kab.Bengkalis )  
 Tanggal Ujian : 08 Oktober 2021

Pekanbaru, 25 Oktober 2021

Disetujui Oleh  
 Pembimbing

**Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, MSi. Ak, CA**  
 NIP. 19751112 199903 2001

Mengetahui

Dekan  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi  
 S1 Akuntansi



**Dr. Mulyarni, SE, MM**  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**Faiza Muklis, SE, M.Si**  
 NIP. 19741108 200003 2 004



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

© Hak cipta ini dimiliki UIN Suska Riau  
Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang

NAMA : LEVI SAVILA  
NIM : 11770323444  
KONSENTRASI : AUDIT  
PROGRAM STUDI : SI AKUNTANSI  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI, KOMPETENSI APARAT PEMERINTAH, DAN KEPATUHAN REGULASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH ( Studi Empiris pada OPD Tahun 2016 di Kab.Bengkalis )  
TANGGAL UJIAN : 08 OKTOBER 2021

DISETUJUI OLEH  
KETUA PENGUJI

**FAIZA MUKLIS, SE, M.Si**  
NIP. 19741108 200003 2 004

MENGETAHUI

PENGUJI I

**NASRULLAH DJAMIL, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19780808 200710 1 003

PENGUJI II

**ELISANOVI, SE, M.Si, Ak, CA**  
NIP. 19680823 201411 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LEVI SAVILA  
 NIM : 1177 0323 444  
 Tempat/Tgl. Lahir : BATU PANJANG, 06 FEBRUARI 1999  
 Fakultas Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : SI AKUNTANSI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pengaruh Sistem Pemerintahan Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah dan Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi empiris Pada OPD tahun 2016 di Kab. Bengkalis)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Oktober 2021  
 Yang membuat pernyataan



LEVI SAVILA  
 NIM : 1177 0323 444

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
3. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyesuaian laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI, KOMPETENSI APARAT PEMERINTAH, DAN KEPATUHAN REGULASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA.**

**(Studi Empiris pada OPD Tahun 2016 di Kab.Bengkalis).**

**OLEH:**

**LEVI SAVILA**

**NIM:11770323444**

*Setiap instansi pemerintah memiliki misi yang ingin dicapai. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem akuntabilitas kinerja merupakan indikator umum untuk mengukur pencapaian misi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi komitmen organisasi, kompetensi aparat pemerintah dan kepatuhan regulasi terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari responden melalui kuisioner yang disebar kan kepada dinas-dinas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di kabupaten Bengkalis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi. Kompetensi aparat pemerintah dan kepatuhan regulasi terhadap akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah.*

**Kata kunci:** *Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Kepatuhan Terhadap Regulasi.*

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

***The Influence of Internal Control System, Information Technology Utilization, Organizational Commitment, Competence of Government Officials, and Compliance with Regulations. on Government Accountability Performance. (Empirical Study on OPD 2016 Bengkalis Regenc)***

**By:**

**LEVI SAVILA**

**NIM:11770323444**

*Each government institution has a mission to be achieved. The achievement of the goals and targets that have been set through the performance accountability system is a general indicator to measure the achievement of the mission. This study aims to determine the effect of the internal control system, the use of information technology on organizational commitment, the competence of government officials and regulatory compliance on the performance accountability of government institutions. This study uses primary data obtained from respondents through questionnaires distributed to the offices of Regional Apparatus Organizations (OPD) located in Bengkalis Regency. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that partially and simultaneously there is a positive and significant influence between the internal control system, the use of information technology, and organizational commitment. Competence of government officials and regulatory compliance with performance accountability in government agencies.*

**Keywords:** *Government internal control system; Information technology utilization; Organizational commitment; Government institution performance accountability, Competence of Government Officials, Compliance with Regulations.*

UIN SUSKA RIAU

## KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah*, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI, KOMPETENSI APARAT PEMERINTAH, DAN KEPATUHAN REGULASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA. (Studi Empiris pada OPD Tahun 2016 di Kab.Bengkalis)”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karyaku yang sederhana ini kupersembahkan kepada :

Ibunda tercinta Izromi dan Ayahanda Alm. Soim, yang selalu menyayangi, memberikan nasihat, menyemangati untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu mengingatkan untuk terus maju dan berjuang menggapai apa yang diinginkan. Semoga harapan dan impian putrimu ini dapat terwujud dan bisa membuatmu bangga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
5. Ibu Dr. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
6. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu, Motivasi dan bimbingan kepada penulis
7. Ibu Harkaneri, SE, M.SA.Ak.CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
8. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, SE, M.Si Ak, CA selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis dari proposal dan skripsi yang sepenuh hati banyak membantu dan memberikan perhatian, motivasi, ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Bapak Dr. Mulia Sosiady, SE, MM. Ak selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
  10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
  11. Seluruh responden yang berada di SKPD Kab.Bengkalis yang telah bersedia meluangkan waktunya mengisi kuisioner yang disediakan oleh peneliti
  12. Kepada saudara kandungan saya, Dedi isroli, Amd. Susriyana, S.Pd. Meli Helmiyeni, S.Pd. Doni Aprianto, Amd dan Selvi Elvarani yang telah banyak memberikan dukungan baik materi maupun non-meteril kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik
  13. Teman-teman lokal A Akuntansi S1 dan lokal Konsentrasi Audit yang selalu membantu dalam perkuliahan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
  14. Teman-Teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi yang tidak bisa disebut satu-persatu selalu mendukung,dan membantu selama perkuliahan penulis
  15. Sahabat yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan Perkuliahan dan skripsi member Anak Baek, Abdi, Anas, Bima yang telah banyak membantu penulis
  16. Partner setia selama perkuliahan dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini Syarafana Putri, yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menemani saat suka maupun duka, saling membantu serta memberikan motivasi untuk selalu semangat.

17. Kepada Teman yang setia membantu penulis, Muhammad Fazli. selama melakukan penelitian di Kab.Bengkalis dari awal hingga akhir serta memberikan motivasi,

18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin*.

Pekanbaru, 20 Agustus 2021

Penulis

LEVI SAVILA

NIM:11770323444

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
2.1 Landasan Teori .....	19
2.1.1 Teori Keagenan ( Agency Theory) .....	19
2.1.2 Teori Akuntabilitas .....	22
2.1.3 Teori Institusional ( <i>Institutional Theory</i> ) .....	26
2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .....	29
2.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah .....	34
2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	44
2.5 Komitmen Organisasi.....	47
2.6 Kompetensi Aparat Pemerintah.....	51
2.7 Kepatuhan terhadap Regulasi .....	57
2.8 Penelitian Terdahulu.....	62
2.9 Pandangan Islam Tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.....	67
2.10 Kerangka Konseptual .....	70
2.11 Pengembangan Hipotesis.....	71
2.11.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah.....	71
2.11.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah.....	72
2.11.3 Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah .....	74



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11.4 Kompetensi Aparat Pemerintah Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah .....	75
2.11.5 Kepatuhan Terhadap Regulasi Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah .....	77
2.11.6 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Dan Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .....	78

### **BAB III METODE PENELITIAN ..... 80**

3.1 Desain Penelitian .....	80
3.1.1 Tujuan studi: Pengujian hipotesis .....	80
3.1.2 Jenis investigasi: Studi kausal.....	80
3.1.3 Tingkat intervensi: Intervensi sedang .....	80
3.1.4 Situasi studi: Studi lapangan.....	81
3.1.5 Unit analisis: Organisasi .....	81
3.1.6 Horizon waktu: Studi cross sectional.....	81
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	81
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	84
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	85
3.4.1 Variabel Dependen .....	85
3.4.2 Variabel Independen .....	85
3.4.2.1 Sistem Pengendalian Internal (X1).....	85
3.4.2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) .....	86
3.4.2.3 Komitmen Organisasi (X3).....	86
3.4.2.4 Kompetensi Aparat Pemerintah (X4) .....	87
3.4.2.5 Kepatuhan Regulasi (X5).....	87
3.5 Teknik Analisis Data .....	91
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	91
3.5.2 Uji Kualitas Data .....	91
3.5.2.1 Uji Validitas.....	92
3.5.2.2 Uji Realibilitas .....	92
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	92
3.5.3.1 Uji Normalitas.....	93
3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas .....	93
3.5.3.3 Uji Multikolineraritas .....	94

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....	94
3.5.4 Uji Hipotesis .....	95
3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	96
3.5.4.2 Uji Signifikansi Variabel (Uji T).....	96
3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	97

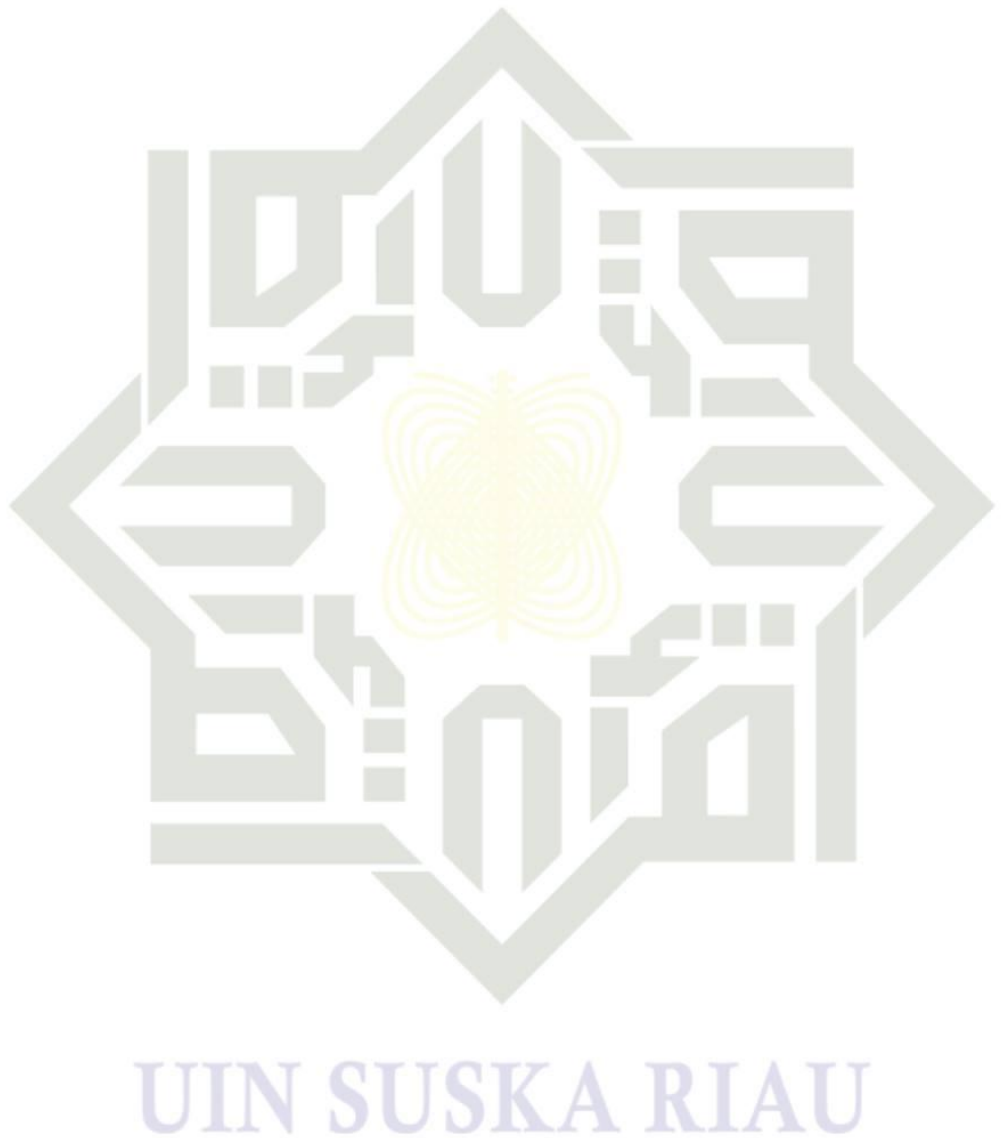
## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 98**

4.1 Hasil Penelitian.....	98
4.1.1 Deskripsi Sampel .....	98
4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden .....	100
4.1.3 Statistik Deskriptif .....	101
4.1.4 Uji Kualitas Data .....	104
4.1.4.1 Uji Validitas.....	104
4.1.5 Uji Asumsi Klasik.....	111
4.1.5.1 Uji Normalitas.....	111
4.1.5.2 Uji Heteroskedastisitas .....	112
4.1.5.3 Uji Multikolineraritas .....	113
4.1.6 Analisis Regresi Linier Berganda.....	114
4.1.7.1 Uji Simultan(Uji F).....	117
4.1.7.2 Uji Signifikansi Variabel (Uji T).....	118
4.1.7.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	121
4.2 Pembahasan .....	122
4.2.1 Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah .....	122
4.2.2 Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.....	123
4.2.3 Pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah .....	125
4.2.4 Pengaruh kompetensi aparat pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah .....	127
4.2.5 Pengaruh kepatuhan regulasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah .....	128
4.2.6 Pengaruh system pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, kompetensi aparat pemerintah, kepatuhan regulasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah	130

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>132</b>
5.1 Kesimpulan.....	132
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	135
5.3 Saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>







## DAFTAR TABEL

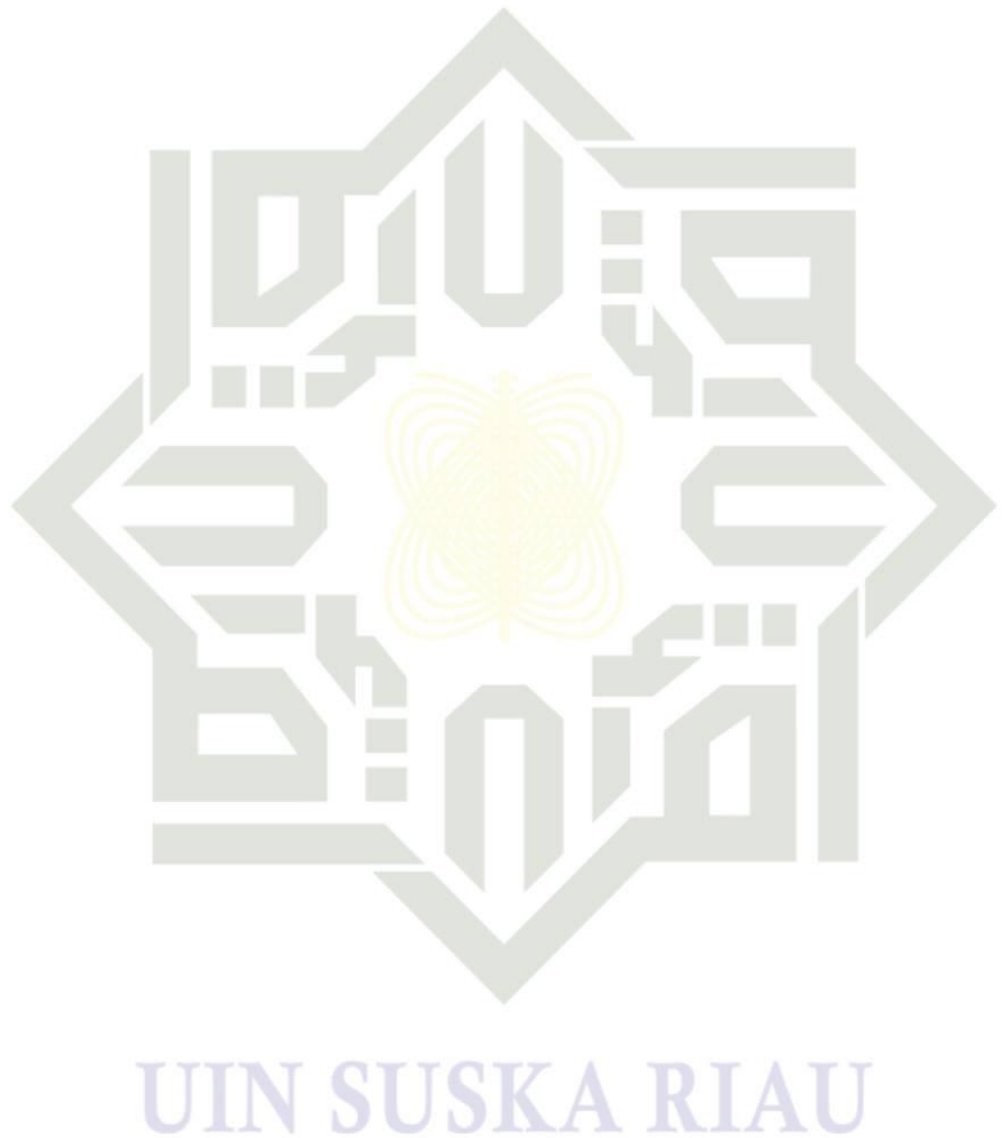
Tabel 2.1 .....	62
Tabel 3.1 .....	82
Tabel 3.2 .....	88
Tabel 3.3 .....	88
Tabel 4.1 .....	98
Tabel 4.2 .....	100
Tabel 4.3 .....	102
Tabel 4.4 .....	105
Tabel 4.5 .....	106
Tabel 4.6 .....	107
Tabel 4.7 .....	108
Tabel 4.8 .....	109
Tabel 4.9 .....	110
Tabel 4.10 .....	111
Tabel 4.11 .....	112
Tabel 4.12 .....	113
Tabel 4.13 .....	114
Tabel 4.14 .....	115
Tabel 4.15 .....	117
Tabel 4.16 .....	118
Tabel 4.17 .....	121

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	70
------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi didengar. Sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 05 Tahun 1974, otonomi daerah sudah mulai diperkenalkan namun baru dirasakan oleh masyarakat pada tahun 2014, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang nomor 9/2015 tentang pemerintahan Daerah (Pratiwi dan Setyowati, 2017). Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sesuai dengan sumber dayanya sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah.

Mardiasmo (dalam Dena Handayani et al, 2020) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berbeda dengan sektor privat, akuntabilitas di sektor publik merupakan suatu hal yang sudah pasti akan muncul. Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai sangat penting untuk dimiliki



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan adanya akuntabilitas tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah serta diyakini mampu memberikan pelayanan public yang prima menuju pemerintahan yang demokratis. Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat

Perkembangan otonomi daerah saat ini menuntut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Menurut Ramadhan (2014) menyatakan bahwa Laporan pertanggung jawaban kinerja pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh instansi pemerintah kepada public atau pejabat yang berwenang yang merupakan kewajiban untuk disusun oleh instansi pemerintah. Pencapaian tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat kinerja. Menurut Santoso (2013) menyatakan bahwa Tujuan laporan akuntabilitas kinerja adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada pihak yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memberikan amanah. Laporan akuntabilitas merupakan alat bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan merespon apa yang telah di capai. Kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang lama dan upaya yang terus menerus. Selain itu, itu juga membutuhkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana yang baik dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar bangsa yakni aparatur pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat guna membina solidaritas untuk mencapai kebaikan pemerintahan. Namun, mencapai tata kelola yang baik menghadapi tantangan yang berat. Tantangannya terutama terletak pada akuntabilitas kinerja pemerintahan itu sendiri sehingga menimbulkan masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam perilaku pemerintah yang tercermin dalam etika bisnis dan publiknya layanan selama jangka waktu yang lama.

Beberapa persoalan mengenai pengelolaan alokasi dana daerah diantaranya adalah: Pertama, lambannya proses pencairan yang disebabkan oleh birokrasi yang berbelit. Akibatnya, efektivitas dana suatu daerah dalam menggerakkan perekonomian di daerah belum optimal. Kedua, kondisi tata kelola suatu daerah sangat bervariasi dari yang sangat kurang hingga yang sudah relatif maju. Ketimpangan juga terjadi pada ketersediaan sarana dan prasarana di suatu daerah disamping keragaman kondisi sosial dan budaya masyarakat daerah. Hal ini berdampak pada tingkat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan administrasi dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan keuangan Ketuga, kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu daerah di kabupaten secara umum berbeda-beda serta kinerja akuntabilitas pemerintahan yang di nilai kurang transparan. Akibatnya, dalam suatu daerah belum mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang baik dan laporan penggunaan dana yang efektif dan akuntabel.

Di Indonesia sistem pengukuran kinerja untuk pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai diatur semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999. Inpres tersebut mengisyaratkan untuk diterapkannya Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah di Indonesia. Potensi munculnya fraud dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan alokasi dana otonomi daerah sangat memungkinkan bila tidak diimbangi dengan kemampuan kinerja akuntabilitas yang baik dan pengawasan yang ketat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia yakni kasus korupsi yang melibat kan kepala daerah di berbagai tempat. Komisi pemberantasan korupsi (KPK) mencatat telah menetapkan sebanyak 127 kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi. Jumlah ini merupakan akumulasi sejak KPK didirikan pada tahun 2003 lalu. Dibeberapa daerah, bahkan seolah-olah kasus korupsi menjadi warisan kepala daerah korupsi kepada penerusnya. Misalnya di provinsi Riau, tiga gubernurnya yakni Saleh Djasit, Rusli Zaenal dan Anas Ma'mun berturut-turut terjerat kasus korupsi. (REPUBLIKA.CO.ID, 2021)

Fenomena mengenai beberapa kasus terkait lemahnya kinerja akuntabilitas pemerintahan yang juga sering terjadi di kabupaten bengkalis yakni terkait tindak pidana korupsi dan penyelewengan anggaran. Penggunaan alokasi dana desa di



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

beberapa Kecamatan di Bengkalis ditemukan beberapa permasalahan yang sedang ditangani oleh kejaksaan negeri Bengkalis. Misalnya Kasus tindak pidana alokasi dana desa terjadi pada tahun 2012 di Kecamatan Rupert yang melibatkan Kepala Desa dan Bendahara Desa Tanjung Punak. Kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 207.000.000. Selain itu berdasarkan pelaksanaan anggaran APBDes tahun 2017-2019 di kecamatan Rupert terdapat banyak anggaran yang tidak teralisasi sesuai semestinya. Anggaran-anggaran ini banyak yang diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan Negara bahkan masyarakat. Anggaran yang seharusnya cukup untuk pembangunan akses jalan transportasi yang kokoh diselewengkan sehingga hasil pembangunan yang didapat pun tidak maksimal sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Tentu ini sangat berdampak pada masyarakat menggunakan akses jalan tersebut, karena belum lama waktu selesai pembangunan jalan tersebut tetapi sudah terdapat banyak kerusakan.

Selain itu berdasarkan pelaksanaan anggaran APBDes tahun 2017-2019 di kecamatan Rupert terdapat banyak anggaran yang tidak teralisasi sesuai semestinya. Anggaran-anggaran ini banyak yang diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan Negara bahkan masyarakat. Anggaran yang seharusnya cukup untuk pembangunan akses jalan transportasi yang kokoh diselewengkan sehingga hasil pembangunan yang didapat pun tidak maksimal sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Tentu ini sangat berdampak pada masyarakat menggunakan akses jalan tersebut, karena belum lama waktu selesai pembangunan jalan tersebut tetapi sudah terdapat banyak kerusakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Untuk tahun 2019/2020 sendiri banyak terdapat kasus korupsi yang menjerat aparaturnya pemerintah dari atas sampai bawah, misalnya kasus korupsi yang melibatkan bupati Bengkalis, Amril Mukmin. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bengkalis Amril Mukminin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis. Amril diduga menerima suap Rp 5,6 miliar. Selain itu, KPK juga menjerat Direktur PT Mitra Bungo Abadi, Makmur alias Aan sebagai tersangka bersama eksekutif Kadis PU Bengkalis M Nasir, dan Hobby Siregar. M Nasir bersama Hobby Siregar dan Makmur ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat (detikNews, 2020).

Baru-baru ini juga terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman yang ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Alumnus IPDN itu diduga korupsi bimbingan teknis (Bimtek) fiktif Rp500 juta. "Hari ini Kadis ESDM Riau inisial IAL kita tetapkan tersangka dan langsung ditahan," ujar Kepala Kejari Kuantan Singingi, Hadiman kepada merdeka.com Selasa (12/10). Hadiman mengatakan, pemeriksaan Indra dilakukan setelah Kejaksaan menerima laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Menurutnya, ada bimbingan teknis pertambangan dari Dinas Pertambangan dan ESDM Kuantan Singingi ke Bangka Belitung pada periode 2013-2014. Indra Agus saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Kuantan Singingi. Kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp500 jutaan itu terjadi pada 2014. (Merdeka.com, 2021)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Stephen Kwamena Aikins (2012) menyatakan bahwa Masalah keuangan di pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir juga telah memotivasi warga untuk memberikan tekanan yang kuat untuk akuntabilitas pada pemerintah, entitas milik pemerintah dan pejabat yang terpilih .Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa adanya masalah terkait dengan keuangan pemerintah daerah memotivasi masyarakat untuk memberikan tekanan yang kuat untuk memperbaiki akuntabilitas pada pemerintah daerah agar dapat di pulih kan kembali dan di kelola sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah dituntut sebagai *agent* dan diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat agar mampu memenuhi harapan masyarakat.

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan / BPKP (2010) mengungkapkan bahwa kebutuhan akan pemerintah dilatarbelakangi regulasi mengenai SPIP berawal dari keluarnya reformasi keuangan negara yaitu berlakunya UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU N0. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Juga, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Bersih dan Bersih Negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme juga menjadi landasan kuat bahwa SPIP sangat dibutuhkan Pemerintah Peraturan Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dikeluarkan untuk mengatur permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia. Itu regulasi menjelaskan bahwa: “Sistem Pengendalian Internal adalah tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk menyediakan kepercayaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan keuanganpelaporan, menjaga aset negara, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan". Sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu pemerintahan akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah bahwa kegiatan yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Ini semua tidak terlepas dari bagaimana kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas nya.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan daerah. Zodia (2015) berpendapat bahwa Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi manajemen di suatu instansi pemerintah untuk membuat, menjalankan dan mengawasi kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu, dengan penerapan teknologi maka organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen dari sistem tradisional menjadi sistem manajemen kontemporer sehingga akan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan. Menurut Sutarman (dalam Dena Handayani et al, 2020) menyatakan bahwa manfaat penerapan teknologi informasi adalah kecepatan, konsistensi, ketepatan, dan reliabilitas.

Menurut Kurniawan (2010) menyatakan bahwa Organisasi harus memberikan perhatian penuh dan membuat karyawan mempercayai organisasi sehingga komitmen karyawan akan diperoleh. Jika komitmen karyawan diperoleh, maka diperoleh karyawan yang loyal. Mengenai komitmen organisasi, Mayer dan Allen (1997) mengidentifikasi tiga tema dalam mendefinisikan komitmen. Ketiga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tema tersebut adalah komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif.

Dena Handayani et al (2020) mengungkapkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja akuntabilitas pemerintah ke arah positif. Artinya semakin tinggi komitmen organisasi maka kinerja akuntabilitas pemerintah juga akan meningkat. Komitmen organisasi berpotensi untuk pengaruh hubungan kompetensi dengan akuntabilitas kinerja, semakin tinggi komitmen organisasi kepala satuan kerja pemerintah daerah; Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja juga akan meningkat.

Menurut Leny Nofianti & Novie Susanti Suseno (2014) menyatakan hasil penelitian nya menunjukkan bahwa implementasi kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan GGG dan Penerapan GGG berpengaruh signifikan terhadap kinerja akuntabilitas pemerintah daerah. Kompetensi menjadi variabel penting untuk diteliti, mengingat bahwa dalam suatu daerah, SKPD mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana daerah yang nilainya cukup besar. Kompetensi terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Pemerintahan daerah dituntut memiliki pejabat pengelola keuangan yang mampu menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu daerah dapat ditingkatkan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat. Untuk implementasi akuntabilitas itu sendiri harus didukung oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perundang-undangan yang memadai dan ketaatan pada implementasi kelembagaan seperti implementasi system penghargaan dan hukuman secara konsisten dan meningkatkan format laporan pertanggungjawaban. Ini menunjukkan akuntabilitas itu kinerja pemerintah dapat dicapai jika organisasi pemerintah mematuhi undang-undang. Menurut Soleman (dalam Sri Pebrianti & Nurna Aziza, 2018) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan ketaatan seseorang dalam mematuhi peraturan yang dimiliki didirikan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Akuntansi pemerintah dan pelaporan keuangan harus menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan terkait hingga penerapan akuntansi pemerintahan. Jika ada konflik antara standar akuntansi keuangan pemerintah dan hukum dan peraturan yang lebih tinggi, maka undang-undang yang lebih tinggi digunakan. regulasi adalah bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang untuk ditaati oleh seluruh warga negara dan secara nasional.

Beberapa penelitian mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah ini sudah pernah dilakukan di antaranya: penelitian yang dilakukan oleh Harfiahani Indah Rakhmah et al (2019) menyatakan bahwa pada pemerintahan kota Lumajang menemukan Hasil penelitian bahwa antara SPIP dan SAP dapat mempengaruhi kualitas dari keuangan Kabupaten Lumajang pemerintah. Variabel SPIP dalam penelitian ini tidak bisa secara langsung mempengaruhi kinerja akuntansibility, tetapi harus ada variabel intervening yaitu kualitas laporan keuangan. kualitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan keuangann dapat menjadi perantara SPIP variabel kinerja akuntabilitas. SAP dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah melalui variabel intervening oleh kualitas laporan keuangan. Kemudian penelitian Yuni Syahputri et al (2019) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan manajemen komitmen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja akuntabilitas. Pengambilan keputusan otoritas sebagian memiliki positif pengaruh pada orang-orang akuntabilitas. Organisasi budaya sebagian memiliki pengaruh positif pengaruh pada orang-orang akuntabilitas sebagian memiliki pengaruh negatif pada akuntabilitas kinerja. Dan penelitian dari Sri Pebrianti & Nurna Aziza (2018) menyatakan bahwa dimana hasil penelitian menunjukkan target anggaran yang jelas, akuntansi pengendalian, sistem pelaporan dan kepatuhan terhadap peraturan mempengaruhi secara positif akuntabilitas kinerja 41 organisasi perangkat regional di pemerintahan kota Bengkulu.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu dari Dena Handayani et al (2020) menyatakan bahwa hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Motivasi dari peneliti terdahulu melakukan penelitian tersebut ialah karena ada beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki kinerja akuntabilitas yang buruk sehingga menarik perhatian

peneliti tersebut untuk melakukan penelitian agar Setiap instansi pemerintah memiliki misi yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan dari suatu instansi. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem akuntabilitas kinerja merupakan indikator umum untuk mengukur pencapaian misi.

**Novelty (keterbaruan)** penelitian ini dari peneliian terdahulu yakni berada pada penambahan 2 variabel baru yakni: Kompetensi Aparat Pemerintah ( Leny Nofianti & Novie Susanti Suseno, 2014) Dan Kepatuhan Regulasi (Sri Pebrianti & Nurna Aziza, 2018) yang terdapat pada daerah otonomi. Dimana daerah otonomi sendiri merupakan daerah yang dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Kompetensi aparat pemerintah di perlukan dalam kinerja akuntabilitas pemerintahan pengelolaan dana daerah karena dalam setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, dan apabila tercapai barulah dapat dikatakan berhasil. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan landasan yang kuat berupa kompetensi. Dengan demikian, kompetensi menjadi sangat berguna untuk membantu organisasi meningkatkan kinerjanya. Kompetensi sangat diperlukan dalam setiap proses sumber daya manusia. Semakin banyak kompetensi dipertimbangkan, maka semakin meningkat pula kinerjanya. Kepatuhan terhadap regulasi juga di perlukan dalam suatu kinerja akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana daerah mengingat Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan mengacu pada penyusunan laporan keuangan, pemerintah harus memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan dalam standar akuntansi pemerintahan. Sebagai negara berbasis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

hukum, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi adalah bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang untuk ditaati oleh seluruh warga negara dan secara nasional. Dengan landasan hukum tersebut diharapkan setiap aparatur pemerintah harus konsisten dan patuh dalam menjalankannya tugas dan kewajibannya guna mewujudkan pemerintahan yang berkinerja baik.

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian. yang hasilnya di harapkan mampu memberikan bahan tambahan evaluasi demi tercapainya kinerja akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan alokasi dana daerah yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan amanat undang-undang. dan yang paling penting disini adalah bagaimana peran aparat pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.

Dari fenomena dan pemaparan di atas, adapun motivasi peneliti melakukan penelitian tersebut yakni karena dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi tindak prilaku korupsi yang berasal dari penyelewengan anggaran/dana daerah. Dimana seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk membangun fasilitas seperti jalan yang dapat digunakan untuk membangun perekonomian rakyat malah terbengkalai. Lemah nya kinerja Akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana yang tidak transparan lah yang menjadi salah satu penyebab mudah terjadinya tindak pidana kasus korupsi. Dalam system pengelolaan nya, pemerintah daerah lah yang mengelola dan mengontrol alokasi dana masuk dan keluar. Sehingga data yang terkait dengan penelitian peneliti dapat di temukan. peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena bagi peneliti sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

seorang anak daerah, peneliti berharap agar peneletian ini suatu saat bisa membantu dalam mengevaluasi kinerja akuntabilitas pemerintah dalam mengalokasikan/mengelola dana daerah. Dengan demikian daerah ini dapat mengelola alokasi dana daerah dengan baik dan benar serta tepat sasaran sehingga dapat menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jadikan populasi dan sampel oleh peneliti untuk mendapatkan data yang di butuhkan dalam penelitian ini karena mereka lah yang bekerja dalam pengelolaan alokasi dana suatu daerah serta kinerja akuntabilitas merekalah yang menentukan bagaimana Akuntabilitas kinerja yang baik memiliki dampak pada kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas audible dan audited Laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah khususnya di kabupaten Bengkalis. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, dan Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja. (Studi Empiris pada OPD Tahun 2016 di Kab.Bengkalis)”**

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada OPD di Kabupaten Bengkalis?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Apakah pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada OPD di Kabupaten Bengkalis?
5. Apakah pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada OPD di Kabupaten Bengkalis?
6. Apakah pengaruh Kompetensi Aparat Pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada OPD di Kabupaten Bengkalis?
7. Apakah pengaruh Kepatuhan Regulasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada OPD di Kabupaten Bengkalis?
8. Apakah Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Dan Kepatuhan Regulasi berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada OPD di Kabupaten Bengkalis?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada OPD di Kabupaten Bengkalis
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada OPD di Kabupaten Bengkalis
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada OPD di Kabupaten Bengkalis
4. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparat Pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada OPD di Kabupaten Bengkalis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Regulasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada OPD di Kabupaten Bengkalis
2. Untuk mengetahui Apakah Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Dan Kepatuhan Regulasi berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada OPD di Kabupaten Bengkalis.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

#### 1. Manfaat Teoretis

##### a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Dan Kepatuhan Regulasi Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Pengelolaan Alokasi Dana Otonomi Daerah.

##### b. Bagi Peneliti yang akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber bacaan di bidang pendidikan dan pemerintahan sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Manfaat Praktis**

**a. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan akuntabilitas dan transparansi kedepannya lebih baik lagi dan sebagai referensi agar kinerja aparat pemerintah dalam melayani masyarakat semakin membaik

**b. Bagi masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang dana otonomi daerah yang mereka punya sehingga masyarakat juga bisa ikut andil dalam pengawasan dana otonomi itu sendiri agar tidak lagi banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang bersifat merugikan

**c. Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Dan Kepatuhan Regulasi Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Pengelolaan Alokasi Dana Otonomi Daerah serta bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

**1.5 Sistematika Penulisan**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan konsep yang mendukung penelitian penulis tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah dan Kepatuhan Regulasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Kemudian juga membahas tentang hasil penelitian terdahulu, ayat pendukung atau pandangan islam akan penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berisi pendekatan penelitian, definisi operasional variabel, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data

## **BAB IV : HASIL DA PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian, pengelolaan data dan pembahasan hasil pengujian hipotesis

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan dan saran-saran yang membangun untuk penelitian yanag selanjutnya yang serupa dimasa yang akan datang.

## BAB II KAJIAN TEORI

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Keagenan ( Agency Theory)

Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. Agency theory membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan dan aktivitas oleh pihak pemegang wewenang (*agent*) kepada pihak pemberi wewenang (*principal*) yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu pertanggungjawaban terhadap dana yang telah dikelola kepada lembaga yang tingkatannya lebih tinggi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Eisenhardt dalam Setyapurnama dan Norpratiwi (2016) menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu, asumsi sifat manusia (*human assumptions*), asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*), serta asumsi informasi (*information assumptions*). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu,



1. *Self interest*, yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri
2. *Bounded-rationality*, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas (berpikir secara relevan dan logis)
3. *Risk aversion*, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko.

Timbulnya persoalan mengenai keagenan akan terjadi saat pemegang wewenang mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya saat melakukan proses penganggaran, pelaksanaan, pengambilan keputusan, sampai menyusun laporan keuangan yang sewajar-wajarnya sebagai bentuk hasil kerja para pemegang wewenang telah sesuai dengan keinginan pemberi wewenang sehingga dapat melindungi kedudukannya agar selalu terlihat baik dan benar di mata pemberi wewenang. Menurut Subaweh (dalam Bandariy, 2011:15). teori keagenan juga mengungkapkan bahwa *agent* memiliki karakter akan memanfaatkan peluang dan cenderung tidak menyukai risiko. Pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif yang memiliki otoritas dan kewenangan menunjukkan tanggungjawabnya seharusnya tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang wajar dan lengkap, namun juga melakukan berbagai cara agar pemerintah sanggup menyediakan akses bagi seluruh pengguna informasi laporan keuangan. Pemerintah daerah selaku *agent* akan selalu berusaha mencegah risiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* atau masyarakat terhadap hasil kerja pemerintah. Maka dari itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk memperlihatkan bahwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil kerja pemerintah selama ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel melalui keuangan daerah yang dikelola.

Dalam hubungan ini terjadi perbedaan kepentingan antara agent dan principal dan adanya perbedaan informasi yang dimiliki serta tujuan dan pilihan risiko terkait usaha yang dilakukan antara agent dengan principal sehingga dapat menimbulkan konflik diantara keduanya (Aikins, 2012). Konflik akan terus meningkat karena principal tidak dapat mengawasi aktivitas agent sehari-hari untuk memastikan bahwa agent telah bekerja sesuai dengan keinginan dari principal sehingga berdampak pada timbulnya asimetri informasi (Latifah, 2010).

Agency Theory beranggapan bahwa banyak terjadi information asymmetry (perbedaan informasi yang didapat antara satu pihak dengan pihak lainnya) antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya information asymmetry inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi information asymmetry. Berdasar Agency theory pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya information asymmetry yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkurangnya information asymmetry maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah adanya hubungan antara prinsipal (masyarakat) dengan agen (pemerintah) dimana agen berkewajiban mempertanggungjawabkan program atau kegiatan yang akan atau telah dilaksanakan guna memberikan informasi kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

## 2.1.2 Teori Akuntabilitas

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Terdapat berbagai definisi tentang akuntabilitas, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Sjahrudin Rasul (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.
2. Ledvina V. Carino (2002) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya. Setiap orang harus benar-benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah harus memperhatikan lingkungannya.
3. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

4. Akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Dalam konteks ini, pengertian akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolak ukur pengukuran kinerja.

Setiap organisasi menginginkan terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dengan berbagai cara dalam memenuhi tuntutan lingkungannya. Untuk memenuhi lingkungan berarti perlu adanya upaya organisasi untuk dapat menggunakan dukungan kemampuan dan memperhatikan kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Keberadaan organisasi salah satunya tergantung akuntabilitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Istilah akuntabilitas tidak terlepas dari istilah akunting ataupun akuntansi yang mempunyai makna laporan, pertanggungjawaban,

perhitungan/nilai. Pengukuran nilai agak menjadi perhatian dalam akuntabilitas dikarenakan didasari oleh sistem akuntansi (Walters, Aydelotte, Miller, 2010).

Pencapaian hasil pada pelayanan publik. Rentetan kegiatan-kegiatan sejak dari pemahaman tugas dan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil akhir akan mempunyai dampak terhadap kegiatan orang lain. Khususnya pihak-pihak yang memerlukan pelayanan. Untuk itu perlu dicermati kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan seseorang/pejabat tersebut masih berada pada jalur otornitasnya atau sudah berada di luar jalur tanggung jawab dan kewenangannya sehingga tingkah laku pejabat perlu memperhatikan lingkungannya. Akuntabilitas dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat sehingga perlu disadari bahwa semua kegiatan organisasi publik dalam memberikan pelayanan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari public (Choirul Saleh, 2012).

Pertanggungjawaban pada dasarnya meliputi penjelasan atau justifikasi tentang apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa rencana yang akan dilakukan. Hal ini sebagai akibat timbul dari adanya prosedur yang dibuat dan hubungan kerja dengan berbagai macam formalitasnya. Oleh karena itu, satu pihak bertanggung jawab kepada pihak lain dalam arti bahwa salah satu pihak dapat meminta penjelasan atau pertanggung-jawaban atas segala tindakan apa yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas mengisyaratkan sebuah kemampuan untuk menjelaskan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menilai pertanggungjawaban dan memberikan penghargaan atau hukum. Semuanya digunakan untuk mewujudkan harapan-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan publik (masyarakat) dan standar kinerja untuk menilai/menentukan kinerja, daya tanggap atau bahkan moral organisasi pemerintah. Hubungan antara teori akuntabilitas dengan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk bertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pada instansi pemerintah, akuntabilitas sangat perlu disampaikan dengan baik dan benar agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah atau instansi pemerintah.

#### 2.1.3 Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Teori institusional (*institutional theory*) atau teori kelembagaan dasar pikirannya adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang akan menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Proses institusionalisasi (pelebagaan) dalam masyarakat terjadi bilamana suatu kelompok memutuskan bahwa seperangkat norma, nilai-nilai, dan peranan tertentu dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidupnya, sehingga diminta agar para anggota masyarakat tersebut mematuhi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (*legitimate*) serta layak untuk didukung (Ridha dan Basuki, 2012).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Teori Institusional yang dikemukakan oleh Scott (dalam Ridha & Basuki, 2008) menjelaskan bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Teori Institusional ini mendefinisikan bahwa organisasi yang mengedepankan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal ataupun harapan sosial dimana organisasi tersebut berada (Fitrianto, 2015).

Ada tiga proses bagaimana organisasi menyesuaikan diri. Pertama, *coersive isomorphism* yaitu proses penyesuaian menuju kesamaan dengan “pemaksaan”. Tekanan datang dari pengaruh politik dan masalah legitimasi. Misalnya, tekanan muncul karena peraturan pemerintah yang memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang kompeten dalam urusan negara dianggap lebih mampu mengawasi jalannya suatu akuntabilitas terutama dalam hal pengelolaan keuangan atau aset negara yang nantinya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat juga.

Kedua, *mimetic isomorphism* yaitu proses di mana organisasi meniru organisasi lain yang berhasil dalam satu bidang, meskipun organisasi peniru tidak tahu persis mengapa mereka meniru, bukan karena dorongan supaya lebih efisien. Menurut DiMaggio dan Powell, biasanya proses peniruan ini muncul di lingkungan yang tidak pasti. Sebagai contoh, manajemen perusahaan Jepang banyak ditiru oleh perusahaan dari negara lainnya karena dianggap berhasil. Ketiga, *normative isomorphism* sering diasosiasikan dengan profesionalisasi dan menanggapi tekanan normatif yang muncul di bidang tertentu. Norma atau sesuatu yang tepat bagi organisasi berasal dari pendidikan formal dan sosialisasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan formal itu di bidang tertentu yang menyokong dan menyebarkan kepercayaan normatif itu. Ketika profesionalisme meningkat maka meningkat juga tekanan normatif itu.

Teori institusional atau teori kelembagaan organisasi relevan untuk riset ini karena penelitian ini mengarahi bagaimana perilaku aparat pemerintah dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau daerah serta pengawasan dari masyarakat. Selain itu, menurut Zucker organisasi dipengaruhi oleh tekanan normatif yang timbul dari sumber eksternal dan organisasi itu sendiri. Tekanan normatif tersebut bisa muncul dari kekuatan hukum atau intervensi pemerintah. Oleh karena itu, dalam menganalisis lingkungan organisasi, maka fokusnya perlu melibatkan pihak-pihak yang melakukan pertukaran secara institusi (misal badan pembuat undang-undang, organisasi politik dan sosial, organisasi profesi, dan sebagainya)

Teori institusional mengandaikan bahwa organisasi menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan bentuk perilaku yang tepat, karena dengan adanya pelanggaran mungkin mempertanyakan legitimasi organisasi dengan demikian mempengaruhi kemampuannya untuk melindungi sumber daya dan dukungan sosial (Dimaggio dan Powel, 1983; Tolbert, 1985 dalam Kusumasari, 2014).

Adapun kaitannya dengan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di pemerintah daerah adalah bahwa menjadi mungkin dapat ditemukan aspek-aspek yang mendukung dan menghambat tercapainya tujuan organisasi, dalam hal ini pencapaian kinerja, yang distimulus dengan diberlakukannya akuntabilitas kinerja



yang baik serta tepat sasaran sesuai dengan tujuan dalam organisasi atau pemerintahan.

## 2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas adalah tanggung jawab atau keadaan yang harus dipertanggungjawabkan atau kondisi yang dimintakan pertanggungjawaban (Bastian, 2013: 88). Sedangkan menurut Tanjung (2014: 11), akuntabilitas merupakan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan aktivitas entitas pelapor yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara berkala. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengartikan akuntabilitas kinerja sebagai wujud kewajiban suatu instansi pemerintah mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya program dan kegiatan yang diamanatkan oleh para pemangku kepentingan guna mewujudkan organisasi yang terukur, misi dengan target atau sasaran kinerja yang telah ditentukan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara berkala. Akuntabilitas dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang lebih ditentukan dengan mempertimbangkan indikator input, output, proses, outcome, manfaat dan dampak.

Indikator kinerja pemerintah daerah menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang memberi gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu sasaran atau tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan memperhatikan:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundangundangan dan sebagainya.
2. Indikator proses misalnya tercermin pada ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan layanan jasa
3. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dan suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan waktu
4. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Misalnya: tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai
5. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dan pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan partisipasinya
6. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik bersifat positif maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Misalnya: peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

Kinerja merujuk pada proses pencapaian suatu tujuan atau sasaran. Bagi suatu organisasi atau unit kerja, elemen utama dari program atau struktur unit

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Karya adalah sumber daya yang digunakan (*input*), apa yang telah dilaksanakan (proses), apa yang dihasilkan (*output*), dan apa manfaat yang dicapai (*outcome*). Informasi kinerja menggambarkan hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Informasi tersebut ikut serta mengidentifikasikan *outcome* atau manfaat dan memantau serta mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari proses yang digunakan dalam rangka mencapai *outcome* tersebut.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan, program dan kebijaksanaan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas ini, diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari organisasi yang bertanggungjawab di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas atas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan dan melaporkannya secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu tatanan instrumen dan metode pertanggung jawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut :

1. Penetapan perencanaan strategik
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output/outcome*) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

Organisasi sektor publik harus menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat yang telah membiayai kegiatannya melalui melalui indikator-indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja kegiatan lebih berguna secara internal untuk memantau kinerja organisasi dengan tujuan peningkatan kinerja manajemen. Indikator tersebut juga menyediakan dasar agar penilaian organisasi sesuai dengan ketentuan atau peraturan. Pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja berguna untuk:

1. Peningkatan manajemen. Indikator kinerja merupakan alat manajemen yang berguna yang berperan penting dalam proses manajemen. Indikator kinerja dapat dilihat sebagai insentif bagi peningkatan kinerja apabila dipergunakan sebagai pedoman dalam mengukur kinerja.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Akuntabilitas. Indikator kinerja membantu organisasi sektor publik dalam mempertanggungjawabkan setiap pengeluarannya kepada masyarakat melalui suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
3. Kepatuhan. Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan peraturan perundangan lainnya maka setiap organisasi sektor publik harus melaporkan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai serta manfaatnya bagi masyarakat.

Setelah rencana kinerja ditetapkan barulah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, yaitu tatanan instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

## 2.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan proses integral dari tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan kepercayaan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Ini memungkinkan keandalan pelaporan keuangan, melindungi aset pemerintah dari penipuan, dan kepatuhan terhadap undang-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



undang (Suwanda, 2019: 110-111). Penerapan sistem pengendalian intern instansi pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien.

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian harus dirancang agar tujuan yang ingin dicapai berjalan efektif dan efisien. Istilah efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima) dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan.

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya, dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 3. Pengamanan aset negara.

Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya pengamanan aset ini, antara lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

#### 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat. Keempat tujuan sistem pengendalian intern tersebut tidak perlu dicapai secara terpisah-pisah dan tidak harus dirancang secara terpisah untuk mencapai satu tujuan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah menurut PP nomor 60/2008 pada pasal 3 angka 1 terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian. Oleh karena itu, Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan perlu diciptakan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik agar instansi pemerintah dapat mengetahui tentang dana masyarakat digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya pengendalian internal, secara keseluruhan Proses evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada organisasi dapat dijadikan tolak ukur efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah meliputi:

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Lingkungan pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai pondasi dasar atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya. Yang dimaksud lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas pengendalian intern. Dalam menerapkan unsur pengendalian intern, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika, yang dapat dilakukan dengan:
  - menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah, menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku, menjelaskan dan mempertanggung jawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern dan menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
- b. Komitmen terhadap kompetensi, yang dapat dilakukan dengan:
  - mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah menyusun standar kompetensi untuk setiap penugasan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah, menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya, memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

- c. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, yang dapat dilakukan dengan: menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah, memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah, memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi pemerintah melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah pegawai yang diberi wewenang memahami wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain Instansi Pemerintah yang bersangkutan. pegawai yang diberi wewenang tersebut memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

#### 2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern wajib menyerahkan evaluasi dari risiko yang ditemui unit organisasi yang berasal dari luar maupun dari dalam. Tidak hanya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian risiko yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh pegawai yang ada di dalamnya harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memantau kejadian-kejadian yang akan menghambat pencapaian visi dan misi organisasi. Risiko yang timbul dalam suatu organisasi dapat disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal.

Risiko internal misalnya adanya peralatan yang tidak memadai, sumber daya yang kurang kompeten, dan suasana kerja yang tidak kondusif. Risiko eksternal misalnya perubahan dalam pemerintahan, gangguan keamanan, atau bahkan bencana alam. Setelah mengetahui risiko yang ada, langkah kedua yang harus diambil adalah membuat suatu keputusan, apakah menerima risiko tersebut, mengurangi risiko sampai batas yang dapat ditoleransi atau menghindari risiko tersebut.

#### 3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian akan mempermudah dalam memastikan bahwa orientasi dari pimpinan lembaga pemerintah telah dikerjakan. Kegiatan pengendalian wajib dilaksanakan secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan mudah dan telah memenuhi sifat, kompleksitas, ukuran, fungsi dan tugas pokok lembaga pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai. Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu mengarahkan tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan dan berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan prosedur. Prosedur yang dimaksud merupakan petunjuk atas rangkaian urutan tindakan dalam melaksanakan kegiatan yang ada, yang disesuaikan sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Kegiatan pengendalian yang ada memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah
  - b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
  - c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah
  - d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
  - e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara tertulis
  - f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
4. Informasi dan Komunikasi
- Informasi wajib dicatat kemudian dilaporkan kepada lembaga pemerintah serta otoritas lain yang telah ditetapkan. Informasi diberikan pada bentuk serta sarana tertentu dan secara tepat waktu yang dilaksanakan dengan efektif kemudian dapat menguatkan pimpinan organisasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dalam melakukan pengendalian serta tanggungjawab yang telah diberikan.

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern itu sendiri. Sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, untuk dapat menciptakan komunikasi atas informasi menjadi efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus dapat memenuhi beberapa hal, yaitu:

- a. Mampu menyediakan dan memanfaatkan bentuk dan sarana komunikasi
- b. Mampu mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5. Monitoring

Pelaksanaan pemantauan diwajibkan mampu mengevaluasi nilai informasi hasil kerja dari periode ke periode dan memastikan jika rekomendasi hasil dari proses audit serta saran lainnya dapat secepatnya dilakukan penindakan yang lebih lanjut. Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern dilakukan dengan pemantauan secara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkesinambungan, penilaian tersendiri, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan saran lainnya.

Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Apabila sistem pengendalian intern yang ada dalam instansi pemerintah dipantau secara berkala maka upaya pencapaian misi organisasi atau instansi pemerintah dapat terlaksana dan pada akhirnya dalam jangka panjang visi pun dapat terwujud. Pemantauan atas pengendalian intern dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Pemantauan berkelanjutan, yang dapat dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
  - b. Evaluasi terpisah, dapat dilakukan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.
  - c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.
- Pelaksanaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.



Dengan melaksanakan system pengendalian yang baik maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan meningkat sehingga dapat mencapai tujuan dari instansi pemerintahan salah satunya yakni untuk mensejahterakan masyarakat.

## 2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting karena sudah banyak organisasi pemerintah yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada organisasi pemerintah tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan TI pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan organisasinya

Teknologi informasi menggabungkan komputerisasi dan komunikasi untuk data, suara dan video (Williams dan Sawyer, (2017). Menurut Zanaria (2017), teknologi informasi bertujuan untuk membantu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Penerapan teknologi informasi dalam organisasi dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan berpotensi mencegah terjadinya keturungan dalam organisasi. Menurut Sutarman (2012) , manfaat penerapan teknologi informasi adalah kecepatan, konsistensi, akurasi, dan reliabilitas.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terintegrasi dengan mempermudah akses antar unit kerja. pengukuran pemanfaatan teknologi informasi didasarkan pada hal-hal berikut: intensitas pemanfaatan, pemanfaatan frekuensi, dan keragaman pemanfaatan paket perangkat lunak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur-unsur dalam Pemanfaatan Teknologi Informai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

a. Penggunaan Komputer

Menurut Hasnidar (2016), sistem informasi yang menggunakan computer adalah suatu kegiatan dimana komputer yang memproses transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang dapat mempermudah proses koordinasi dan pengendalian seluruh kegiatan organisasi.

b. Penggunaan Jaringan

Berdasarkan *Cetak Blue Print Sistem Aplikasi e-Government* (2011) yang diterbitkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3/2003, struktur kerangka Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terdiri dari:

- 1) Akses, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Internet dan Media Komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
- 2) Portal, Pelayanan Publik berbentuk situs web pemerintah yang menggunakan internet sebagai penyedia layanan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan data-data yang akan menjadi informasi penting dan dokumen elektronik di seluruh OPD;
- 3) Organisasi sebagai wadah dalam pengelolaan dan pengolahan seluruh informasi organisasi yang akan digunakan sebagai pendukung sumber

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya manusia dalam mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi serta dokumen elektronik; dan

- 4) Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana yang berbentuk perangkat keras dan lunak untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi dan informasi maupun infrastruktur berupa portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2005), Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat dinilai melalui pemanfaatan komponen-komponen berikut ini:

- a. Perangkat Keras Komputer (*Hardware*), yaitu suatu sistem informasi yang terdiri atas input dan output. *Hardware* digunakan sebagai alat penyimpanan file, mempersiapkan data serta terminal input maupun output.
- b. Perangkat Lunak Komputer (*Software*), yaitu adanya perkembangan software yang digunakan untuk membantu pengalokasian informasi dan data semacam sistem pengoperasian. Selain itu penggunaan software sebaiknya didukung juga dengan software dan sistem yang berbasis computer untuk melengkapi keperluan pemakai informasi, seperti: e-commerce, e-banking, DSS (Decision Support System), SAP (System Application and Processing), dan sebagainya.
- c. Jaringan dan Komunikasi, yaitu suatu sistem yang dapat mengkaitkan serta memadukan lebih dari satu titik komunikasi sehingga menjadi satu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesatuan yang dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Internet adalah salah satu cara yang digunakan untuk mempermudah serta memelihara mutu hubungan dengan pengguna informasi dan antar unit organisasi. Maka dari itu, alat-alat yang dapat mendukung kemampuan jaringan terus dikembangkan agar para pihak-pihak yang sedang dan akan bertransaksi dapat saling berhubungan dengan pesat.

penggunaan teknologi informasi sebagai pilihan individu untuk menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan tugas atau perilakunya. penggunaan teknologi di lingkungan kerja. Pengukuran didasarkan pada intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola informasi keuangan pemerintah.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi maka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat tersedia dengan cepat dan akurat, tidak hanya masyarakat yang dengan mudah mendapatkan informasi pemerintah pusat juga dapat dengan mudah memperoleh informasi guna meningkatkan potensi yang ada di daerah setempat. Dibutuhkan akuntabilitas kinerja yang baik dan bagus agar pemanfaatan teknologi informasi ini bisa tepat guna.

## 2.1.2. Komitmen Organisasi

Dalam perilaku organisasi terdapat berbagai definisi tentang komitmen organisasi. Menurut Sutrisno (dalam Dena Handayani et al, 2020) menyatakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa komitmen organisasi adalah keinginan yang kuat untuk menjadi anggota dalam suatu kelompok dan kepercayaan serta penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Robbin dan Judge (2008) mengemukakan bahwa komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Komitmen organisasi adalah perilaku karyawan yang berkaitan dengan kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi, kesediaan untuk bekerja demi pencapaian kepentingan organisasi, dan keinginan untuk mempertahankan posisi sebagai anggota organisasi.

Keberhasilan pengelolaan organisasi sangatlah ditentukan oleh keberhasilan dalam mengelola SDM. Tinggi rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja, sangatlah menentukan kinerja yang akan dicapai organisasi. Dalam dunia kerja komitmen karyawan memiliki pengaruh yang sangat penting, bahkan ada beberapa organisasi yang berani memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu syarat untuk memegang jabatan/posisi yang ditawarkan dalam iklan lowongan kerja. Setiap pegawai memiliki dasar dan perilaku yang berbeda tergantung pada komitmen organisasi yang dimilikinya. Pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan melakukan usaha yang maksimal dan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya Pegawai yang memiliki komitmen rendah akan melakukan usaha yang tidak maksimal dengan keadaan terpaksa.

Robbins dan Judge (dalam Dena Handayani et al, 2020) mengklasifikasikan komitmen organisasi menjadi tiga indikator terpisah, yaitu komitmen afektif,

komitmen kontinyu, komitmen normatif. Komitmen juga dikaitkan dengan kesesuaian antara individu dan organisasi. Penyebab komitmen afektif lebih banyak berkaitan dengan pengalaman dalam bekerja yang dapat memenuhi kebutuhan individu sehingga merasa nyaman dan kompeten dalam menjalankan perannya dalam bekerja. Komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif lebih terkait di luar pengalaman kerja langsung. Komitmen terus menerus berkembang dari berbagai peristiwa yang menaikkan harga yang harus ditanggung jika keluar dari organisasi.

Komponen komitmen organisasi meliputi:

a. Komitmen afektif (*affective commitment*)

Komitmen yang terjadi ketika pegawai memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari organisasi karena ikatan emosional (*emotional attachment*) maupun ikatan psikologis terhadap organisasi.

b. Komitmen berkelanjutan (*continuance commitment*)

Komitmen yang terjadi ketika pegawai tetap bertahan dalam bertahan di organisasi karena memerlukan gaji dan manfaat lainnya, maupun disebabkan oleh pegawai tidak berhasil mendapatkan pekerjaan lain. Dapat dikatakan juga bahwa pegawai memilih untuk tinggal di organisasi karena pegawai tersebut memerlukan organisasi tersebut.

c. Komitmen normative (*normative commitment*)

Komitmen yang berasal dari nilai-nilai yang ada di dalam diri pegawai. Pegawai bertahan menjadi bagian dari organisasi karena memiliki kesadaran bahwa komitmen organisasi yang merupakan hal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



memang harus dilaksanakan. Jadi, pegawai memilih untuk tinggal di organisasi karena telah sadar bahwa dia memiliki kewajiban dalam melakukan komitmen organisasi.

Komitmen organisasi dapat dilihat dari etos kerja dan loyalitas karyawan dalam menjalankan segala aktivitas. Komitmen organisasi ada jika individu dalam organisasi menyadari hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat posisi dan perannya. Pencapaian tujuan organisasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota organisasi secara kolektif.

Keberhasilan dalam mengelola organisasi sangatlah dipengaruhi oleh komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Komitmen karyawan memiliki pengaruh yang sangat penting dibuktikan dengan adanya beberapa organisasi yang memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu ketentuan dalam memperoleh jabatan atau posisi yang ditawarkan dalam lowongan kerja. Tingginya komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan akan mempengaruhi karyawan untuk melakukan usaha yang maksimal dan memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan adanya komitmen organisasi ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah serta mengurangi resiko perilaku penyimpangan. agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

## 2.6 Kompetensi Aparat Pemerintah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya pada pasal 233 ayat 2 dijelaskan bahwa kompetensi pemerintahan antara lain mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi pada dasarnya terdiri komponen pengetahuan, keahlian dan sikap. Dengan demikian kompetensi dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan, keterampilan dan tingkah laku yang dimiliki seseorang. Tingkat kompetensi pengetahuan dan keahlian memperlihatkan karakteristik yang dimiliki manusia lebih nyata dibandingkan dengan sikap. Sikap merupakan bentuk kompetensi yang lebih tersembunyi dan berada pada titik sentral kepribadian seseorang. Kompetensi menggambarkan apa yang dilakukan di tempat kerja. Apa yang dikerjakan tersebut dijelaskan pada berbagai tingkatan dan diperinci standar tersebut untuk masing-masing tingkatan. Dengan mengidentifikasi karakteristik pengetahuan dan keterampilan individu yang diperlukan ditempat kerja memungkinkan tugas dan tanggung jawab akan dilakukan secara efektif. Dengan demikian standar kualitas profesional akan dapat dicapai (Kompri, 2017).

Kemampuan serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di dalam organisasi sangat menentukan kesuksesan organisasi untuk meraih tujuan. Dalam organisasi sektor publik, peran sumber daya manusia lebih menekankan pada keahlian dalam memberikan pelayanan yang paling unggul untuk masyarakat, kemudian lembaga pemerintah tersebut akan memiliki penilaian hasil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kerja yang baik serta akuntabel di dalam perspektif masyarakat, sehingga kompetensi sumber daya manusia pada setiap tingkatan manajemen adalah hal yang sangat penting dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah pada pemerintahan.

Penetapan level kompetensi diperlukan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diinginkan untuk kategori baik atau diatas rata-rata ditentukannya batas kompetensi karyawan yang diperlukan pastinya mampu dijadikan sebagai patokan untuk suksesnya proses perencanaan, seleksi, penilaian hasil kerja serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Individu yang memiliki kompetensi dalam dirinya akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan lancar, terampil, inisiatif, kreatif dan dengan pengalamannya dapat mengurangi timbulnya kesalahan. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Kompetensi dibedakan menjadi tiga jenis:

- a. Kompetensi Teknis, yaitu sikap atau perilaku, keterampilan, serta pengetahuan yang berkaitan dengan bidang teknis Jabatan sehingga dapat diukur, diamati, dan dikembangkan;
- b. Kompetensi Manajerial yaitu sikap atau perilaku, keterampilan, serta pengetahuan dalam melaksanakan kepemimpinan dan/atau mengendalikan organisasi yang dapat diamati, diukur, dikembangkan;
- c. Kompetensi Sosial Kultural yaitu sikap atau perilaku, keterampilan, serta pengetahuan mengenai pengalaman berhubungan dengan rakyat majemuk dalam urusan budaya dan suku, agama, prinsip, emosi, moral,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai, etika, wawasan kebangsaan, dan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan, sehingga wajib dimiliki bagi seluruh pemegang jabatan untuk mendapatkan hasil kerja yang akan sesuai dengan fungsi, peran, dan tugas pokoknya.

Disebutkan juga pada pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bahwa pejabat administrator harus memiliki rasa tanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka unsur-unsur Kompetensi aparat Pemerintah meliputi:

#### a. Latar Belakang Pendidikan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan, Abdul Djalil Saputra (2002) mendefinisikan pendidikan sebagai katalisator dan komponen dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki keunggulan kompetitif.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan keintelektualitasan seseorang. Jika seseorang memiliki tingkat intelegualitas yang tinggi maka akan lebih

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk menciptakan keuangan daerah yang dikelola dengan baik dan benar, maka seluruh satuan kerja perangkat daerah pada sub bagian keuangannya wajib memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi maupun keuangan agar lebih mudah memahami segala transaksi maupun kejadian yang berkaitan dengan akuntansi.

#### b. Pelatihan

Pelatihan merupakan proses secara sistematis mengubah tingkah laku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan kemampuan dan keahlian karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu karyawan untuk mencapai kemampuan dan keahlian tertentu sehingga dapat berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Sumber daya manusia yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan dapat menghasilkan pengaruh yang baik pada kinerja karyawan tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan adanya peningkatan pada kinerja organisasi jika *training* terhadap karyawan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Untuk menghasilkan keuangan daerah yang dikelola dengan baik dan benar, maka sebaiknya terdapat program *training* untuk karyawan lembaga pemerintah agar terciptanya karyawan yang menguasai cara maupun proses penyajian laporan keuangan daerah yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan standar sebagai upaya untuk mewujudkan laporan keuangan daerah yang baik

#### c. Pengalaman

Pengalaman kerja adalah proses pembentukan keterampilan maupun pengetahuan yang terkait dengan metode suatu pekerjaan karena keterlibatannya dalam melaksanakan fungsi dan tugas. Pengalaman kerja juga dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu atau masa kerja yang pernah dilakukan seseorang dengan baik dalam memahami tugas dan fungsi suatu pekerjaan. Dengan kata lain, sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dapat dipengaruhi oleh lama waktu atau masa kerja, tingkat keterampilan maupun pengetahuan yang dimiliki, dan penguasaan pada pekerjaan dan peralatan yang digunakan. Begitu pula dalam penyajian laporan keuangan daerah, pada sub bagian keuangan satuan kerja perangkat daerah wajib memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman di bidang akuntansi maupun keuangan, karena dalam penyajian laporan keuangan diperlukan karyawan yang memahami akuntansi maupun keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurut Leung et al( dalam Leny Nofianti & Susi Suseno, 2014) mempelajari peran audit internal dalam tata kelola perusahaan dan pengelolaan. Studi tersebut merekomendasikan bahwa untuk meningkatkan peran audit internal dalam tata kelola perusahaan, Perusahaan harus fokus pada kompetensi auditor



internal dalam memberikan jaminan kepada manajemen dan komite integritas dalam bentuk informasi.

Kompetensi aparat pemerintah suatu daerah didukung oleh pendidikan formal, pendidikan serta pelatihan dan pengalaman kerja. Pendidikan formal berguna untuk kesesuaian kompetensi dengan pendidikan formal seorang pegawai. Dalam kompetensi aparat pemerintah kemampuan seorang pegawai berguna dalam melakukan penyajian laporan keuangan secara tepat. Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan cara melakukan pendidikan lebih lanjut serta pelatihan guna melakukan pekerjaan yang lebih spesifik dimasa sekarang dan yang akan datang. Selain itu, ini juga di dukung dengan pengalaman kerja yang baik dalam memahami akuntansi dan keungan serta aturan-aturan dalam penyusunan nya.

Kompetensi aparatur terkait aspek pribadi dari yang bersangkutan. Kompetensi yang dimiliki akan menentukan pencapaian kinerja seseorang. Aspek pribadi tersebut meliputi sifat, motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi aparatur pemerintah mutlak diperlukan agar pengelolaan dana suatau daerah untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan daerah yang optimal. Sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu maka ia harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

## 2.7 Kepatuhan terhadap Regulasi

Tujuan dari peraturan perundang-undangan negara adalah untuk mengatur dan mendisiplinkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan hukum atau peraturan, itu kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. Jika ada konflik antara standar akuntansi keuangan pemerintah dan hukum dan peraturan yang lebih tinggi, maka undang-undang yang lebih tinggi digunakan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman bagi organisasi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan juga sejalan dengan sistem anggaran pemerintah. Ini berarti akun-akun dalam laporan keuangan harus sesuai dengan akun dalam penganggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 itu menyusun dan menyajikan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip dalam sistem akuntansi pemerintahan. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan mengacu pada penyusunan laporan keuangan; pemerintah harus memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan dalam standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas jika laporan keuangan pemerintah daerah memiliki karakteristik kualitatif seperti (a) relevan, (b) dapat diandalkan, (c) dapat dibandingkan, dan (d) mudah dipahami. Didalamnya juga dijelaskan bahwa pengertian dari karakteristik kualitatif informasi keuangan ialah ukuran-ukuran normatif yang harus direalisasikan dengan informasi akuntansi sehingga dapat mencapai tujuannya. Penjelasan terkait dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Relevan (*relevance*), yaitu laporan keuangan yang di dalamnya termuat informasi yang berpengaruh pada keputusan pemakai informasi dengan mendukung mereka dalam menilai kejadian masa kini maupun masa lampau, serta memperkirakan masa yang akan datang, dan dapat digunakan untuk memperbaiki hasil penilaian kinerja di masa lalu. Dengan demikian, laporan keuangan yang memiliki informasi relevan dapat dikaitkan dengan tujuan pemanfaatannya. Informasi yang relevan:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), terdapat informasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memastikan atau mengoreksi ekspektasi pengguna laporan keuangan di masa lalu.
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), adanya informasi yang mempermudah pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil informasi dari masa lalu dan kejadian masa kini.
- 3) Tepat waktu (*timeliness*), adanya informasi yang telah disajikan secara tepat waktu sehingga informasi tersebut dapat digunakan dalam pembuatan keputusan yang tepat.
- 4) Lengkap (*completeness*), terdapat informasi yang berisi mengenai akuntansi keuangan pemerintah yang disajikan secara lengkap, mencakup seluruh informasi akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dengan memperhatikan masalah yang terjadi. Untuk mencegah adanya kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut maka informasi yang melatarbelakangi setiap unsur informasi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama yang terdapat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas dan lengkap.

- b. Andal (reliability), yaitu dalam laporan keuangan tidak terdapat informasi yang memiliki pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan informasi yang berisi fakta secara jujur, serta informasi tersebut dapat diverifikasi dengan adanya bukti. Walaupun suatu informasi dapat dikatakan relevan, namun jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut dapat berpotensi menyesatkan pengguna informasi. Informasi dikatakan reliabel jika telah memenuhi karakteristik seperti berikut:

- 1) Penyajian yang jujur (*representational faithfulness*), terdapat informasi yang menjelaskan dengan jujur transaksi serta kejadian lainnya yang sebaiknya diungkapkan.
- 2) Mampu diverifikasi (*verifiability*), terdapat informasi yang mampu diselidiki maupun diverifikasi buktinya, serta jika penyelidikan dilaksanakan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya akan tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.
- 3) Netralitas (*neutrality*), terdapat informasi dalam laporan keuangan yang mengarah pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.

Sebagai negara berbasis hukum, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi adalah bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang untuk ditaati oleh seluruh warga negara dan secara nasional.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dengan landasan hukum tersebut diharapkan setiap aparatur pemerintah harus konsisten dan patuh dalam menjalankannya tugas dan kewajibannya guna mewujudkan pemerintahan yang berkinerja baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah di penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam membuat akuntabilitas instansi pemerintah, ada beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain: Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban kinerja perlu dipenuhi seragam secara garis besarnya, sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa mengabaikan keunikan masing-masing unit organisasi badan pemerintah. Keseragaman ini setidaknya dapat mengurangi keberagaman yang cenderung minim pemenuhan prasyarat untuk informasi yang harus dimuat dalam laporan ini. Keseragaman juga dimaksudkan agar pelaporan rutin perbandingan dapat dilakukan secara memadai.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.08 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Peraturan pemerintah ini selain memperjelas satuan instansi yang berkedudukan sebagai entitas pelaporan atau entitas akuntansi, juga mewujudkan pengintegrasian laporan pertanggungjawaban kinerja pada laporan pertanggungjawaban keuangan. Pengintegrasian pelaporan keuangan dan kinerja ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan anggaran berbasis kinerja (outputs) dan memfasilitasi penyederhanaan sistem pelaporan yang selama ini masih terpisah. Komponen laporan keuangan dalam PP.No.08 tahun 2006 terdiri atas:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Laporan Realisasi Anggaran: menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.
2. Laporan neraca: menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.
3. Laporan Arus Kas: menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP.No.08 tahun 20016 ,berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi rencana kerja dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait, ilustrasi format Laporan Kinerja disajikan pada Lampiran III.

Pelaporan Akuntabilitas Keuangan Instansi pemerintah disiapkan di akhir tahun fiskal (secara berkala). Pelaporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah harus dilakukan secara tertulis dan dikirim tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah wajib disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun fiskal berakhir. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap aturan adalah kepatuhan organisasi dalam mematuhi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat guna mengatur dan menertibkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya kepatuhan kelembagaan seperti itu penerapan sistem penghargaan dan hukuman secara konsisten. Dengan kemauan sikap dan pengertian dalam menaati berbagai aturan dan prosedur maka akan tercipta kondisi yang memungkinkan tidak terjadi kecurangan dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Kepatuhan terhadap regulasi ini didukung oleh penyusunan laporan keuangan yang telah sesuai dengan format laporan yang telah memenuhi persyaratan diantaranya: sesuai dengan standar akuntabilitas pemerintah, bentuk dan isi yang seragam serta menyajikan secara berkala setiap akhir tahun anggaran.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan guna menguji pengaruh variabel-variabel yang dapat memperngaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil	Keterbatasan/Saran
Dena Handayani et al (Journal Of Accounting Auditing and Business, Vol. 3, No.2, 2020)	<i>The Influence of Internal Control System, Information Technology Utilization, And Organizational Commitment</i>	<b>Variabel Independent:</b> <i>The influence of internal control system, Informa-tion technology utilization, and Organizational</i>	<i>The result of this study indicate thatpartially and simultaneously, there is a positive and significant influence between the government internal control</i>	<i>In Order to improve government accountability perfomance requires, local government should consider a sound internal</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil	Keterbatasan/Saran
	<i>on Government Accountability Perfomance</i>	<i>commitment.</i> <b>Variabel Dependent:</b> <i>Government Accountability Perfomance.</i>	<i>system, information technology utilization, and organizational commitment on accountability perfomance of governmenr institutions.</i>	<i>control system, optimal utilization of information technology, and strong organizational commitment. for the next research, it is recommended to add some other independent variabls that potentially influence government accountability performance and expand the research area in other local government Indonesia.</i>
Dwi Fitri Puspa, & Riky Agung Prasetyo (Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol. 20 No. 2 September 2020 : 281-298)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal & Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi empiris pada daerah kota Pariaman)	<b>Variabel Independent:</b> Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, sistem Pengendalian Internal & Aksesibilitas laporan Keuangan . <b>Variabel Dependent:</b> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi & Sistem Pengendalian internal Berpengaruh terhadap akuntabilitas penge-lolaan Dana Desa. Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.	Penelitian ini dilakukan di lingkup kota pariaman Tingkat pengembalian 97% namun tidak semua kuisioner yang kembali dapat di olah. Ada 28% kuisioner yang kembali tidak bisa di olah karena banyak item yang tidak di isi oleh responden
Haifahani Indah Rakhma Ningtyas et al (International Journal of	<i>The effect of government internal control system and government</i>	<b>Variabel X:</b> <i>The effect of government internal control system and</i>	<i>The result this study that between SPIP and SAP can affect the quality of the financial</i>	<i>this study has several limitations, one of which is, the implementation of resech in</i>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil	Keterbatasan/Saran
Business, Economic and Law, Vol. 18, Issue 5 february, ISSN 2289-1552, 2019)	accounting system on perfomance accountability with the financial quality statements as intervening variables. (Case study: the government of Lumajang Regency, East Java)	government accounting system <b>Variabel Y:</b> Perfomance Accountability <b>Variabel intervening:</b> Financial quality statement	Lumajang District government. The SPIP variable in this study cannot dirrectly influence performance accountability, but there must be an intervening variabel, namely the quality of financial statement. quality of financial statement can be intermediary for the SPIP variables on perfomance accountability. SAP can influence the perfomance accountability of government agencies through the intervening variables by the quality of finanacial reports.	lumajang regency was hampered because several SKPD were still preoccupied with annual fianancial reports or accountability so researchers could only request result from questionnaires without interviews with those concerned. There several SKPD result from the quistionnaire there is no difference from the four result of the response.
Titi Rismawati (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komite Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi & Sistem	<b>Variabel Independen:</b> Kompetensi Aparat Penge-lola Dana Desa, Komite Organisasi Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi informasi & Sistem Pengendalian	Komite Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif. Sedangkan Kompetensi & Sistem Pengendalian internal tidak	Berdasarkan Uji validitas terdapat 40% instrumen yang tidak valid, sehingga indikator dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini belum mencerminkan indikator yang sesuai dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil</b>	<b>Keterbatasan/Saran</b>
	Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kec. Bandongan)	Internal. <b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	berpengaruh Terhadap akuntabilitas Dana Desa	konstruknya.
Sri Pebrianti dan Nurna Aziza, (Advance in social Science, Education and Humanities Research, Vol. 292. 1st Aceh Global Conference 2018)	<i>Effect of Clarity Of Budget Objectives, Accounting Control, Reporting System, Compliance with Regulation on Perfomance Accountability of Government Agencies.</i>	<b>Variabel Independent:</b> <i>Effect of clarity of budget objectives, Accounting control, Reporting system, Compliance with Regulation.</i> <b>Variabel Dependent:</b> <i>Perfomance accounta-bility.</i>	<i>The result of the study show that clear budget target, accounting control, reporting system and compliance with regulations positively influence the performance accountability of 41 regional device organizations in Bengkulu city government.</i>	<i>Therefore, financial manaagers in regional apparaturs organizations in the Bengkulu city government need to make efforts to increase compliance with regulations in budget management in order improve government performance accountability.</i>
Arif Widyatama, Lora Novita, Didespati. (Berkala Akuntansi dan keuangan Indonesia, Vol. 02 N0.02 (2017) :1-20 )	Pengaruh Kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	<b>Variabel Independent :</b> Pengaruh Kompetensi dan sistem pengendalian internal. <b>Variabel Dependent :</b> Akuntabilitaas alokasi dana desa	kompetensi tidak berpengaruh, sedangkan sistem pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pengelolaan alokasi dana desa	penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel saja, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas alokasi dana desa. Serta dalam penelitian ini hanya menggunakan kuisisioner saja
Lenny Nozianti & Nozlie	<i>Factor affecting implementation</i>	<b>Variabel Independent:</b> <i>The</i>	<i>The result show that the implementation</i>	<i>Based on the result of the study:</i>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil	Keterbatasan/Saran
Susanti Suseno (International Conference On Accounting Studies 2014, ICAS, 18-19 August, Kuala Lumpur Malaysia)	<i>of good governance (GGG) and their implications towards performance accountability</i>	<i>competence of local government apparatus, professionalism of the governmental internal controlling apparatus.</i> <b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> <i>Perfomance accountability</i>	<i>of the competence of local government apparatus and the professionalism of the government internal controlling apparatus have significantly affect to the implementation of GGG and the application of GGG have significantly affect to the local government accountability performace</i>	1. This study is a case study intended to explain a phenomenon in Riau province, therefore the result cannot be generalized unless to any province with similar characteristics. In addition, a resembling study with the same research pattern and instrument need to be conducted in different provinces to show reliable evidence on the improvement of accountability in such provinces. 2. The considerable E (error) toward GGG as much as 61.2% indicated the limitation of the observed variable in the model in this study.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil	Keterbatasan/Saran
				Good government in macro scope in the forms of regulations and acts can be added
Stuart Tooley, Jill Hooks and Norida Basnan (In ethics, equality, and Regulation advances in public interest accounting, Vol 15, 161-193)	Stakeholders' Perceptions On The Performance Accountability Of Malaysian Local Authorities.	<b>Variabel Independent:</b> Stakeholders Perceptions <b>Variabel Dependent:</b> Performance Accountability	This show that the performance of local authorities is of increased interest, significance and value to the stakeholders and implies that Malaysian local authorities need to reflect a result-orientated environment in order to meet their stakeholders' expetations. Overall accountability was recognised as an essential component of power (defined, implied, and delegated) and a responsibility imposed by the local authorities' ability to collect and use public money.	The major limitation of this study is that the scope of the research is limited and convenience sampling is used, thus limiting the generalisability of the result. The findings and discussion are limited to the propositions pu forward in the quistionnaire and such a survey instrument provides limited opportunity to solicit further meanings to participant's responses.

## 2. Pandangan Islam Tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Al-Qur'an diturunkan Allah SWT sebagai kitab suci umat Islam untuk menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Meskipun Al-Qur'an diturunkan 1400



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun yang lalu, namun isinya masih tetap relevan hingga sekarang. Al-Qur'an bagi umat Islam dianggap sebagai 'rumus canggih' yang di dalamnya terdapat berbagai macam disiplin ilmu yang telah teruji kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern, beberapa di antaranya dalam bidang medis, teknologi, sosial, dan pemerintahan.

**Accountability** atau biasa disebut dengan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* (hitung). Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan di *hisab* (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak (QS 99:7-8).

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya {1}. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula {2}". (Q. Al zalzalah :7-8)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٢٦﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya". (Qs. Al-Isra : 36)

Beberapa ayat diatas menjelaskan bahwasannya pada hari kiamat kelak Allah akan membalas semua perbuatan kita. Semua perbuatan baik itu kebaikan atau kejahatan akan ada balasannya, walaupun perbuatan itu hanya sebesar zarrah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut tafsir quraish shihab zukuran zarrah itu adalah seukuran butir debu. Dan setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا  
بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka telitilah berita itu agar kalian tidak memberikan keputusan kepada suatu kaum tanpa pengetahuan sehingga kalian akan menyesali diri atas apa yang telah kalian kerjakan”. (QS al-Hujurat ayat 6)

Dalam surat Al-Hujarat tersebut menjelaskan bahwa kita harus teliti terhadap informasi yang disampaikan oleh orang lain. Dengan jelas Al-Qur’an telah mengajarkan kepada kita bahwa setiap informasi yang kita terima, harus dilakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut. Seperti hal nya informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang harus dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta dapat bermanfaat bagi para pengguna nya.

Merupakan kewajiban setiap muslim untuk beriman kepada hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan di dunia ini, karena kelak setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah, mereka wajib mempertanggungjawabkan tugas yang telah di amanahkan oleh Negara untuk kepentingan masyarakat atau umat manusia.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan

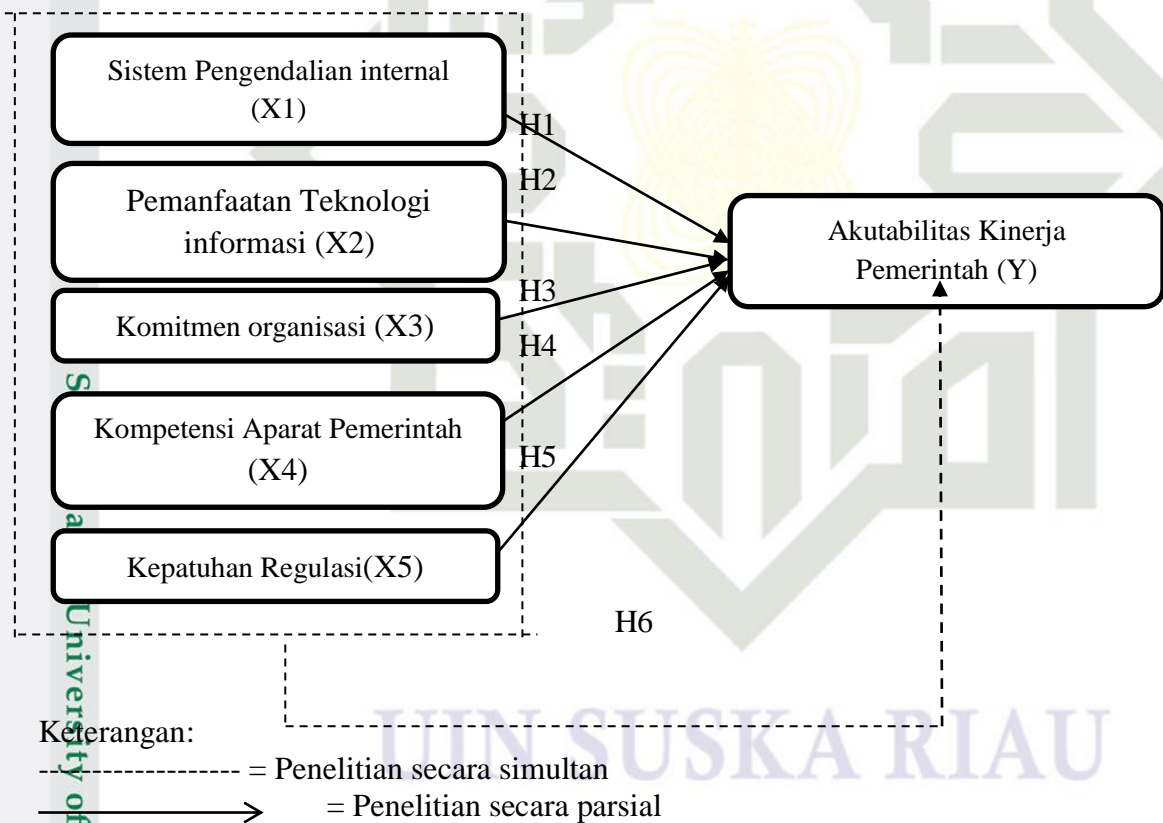
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya...*” (HR al-Bukhari no. 2751 dan HR Muslim No 4828).

Komitmen sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, karena hal ini akan berkaitan dengan keseriusan dan tanggung jawab seseorang dalam memegang amanahnya menjadi seorang *leader*. Seorang pemimpinlah yang akan mempengaruhi pengikutnya (dalam konteks pemerintahan adalah para jajaran stafnya) menuju ke arah yang lebih baik.

## 2.10 Kerangka Konseptual

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Konseptual**



**Sumber: Jurnal Angel, Dkk (2017) dan data olahan penulis 2021**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.1 Pengembangan Hipotesis

### 2.1.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah

Sistem pengendalian intern dapat diwujudkan sebagai komponen manajemen yang digunakan sebagai alat pencapaian beberapa tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin terselenggaranya ketaatan kepada peraturan serta hukum yang berlaku, menjamin data keuangan dan laporan keuangan yang dapat diandalkan, memberikan fasilitas agar terwujudnya efektifitas dan efisiensi atas kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah. Maka dari itu, pengendalian intern adalah dasar dari *good governance* dan fondasi perlindungan untuk menghadapi ketidakpastian data serta informasi dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (Ningrum, 2012).

Sistem pengendalian internal adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi (PP 60/2008). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar atas pencapaiannya tujuan pengelolaan dalam kategori berikut; (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi dan (3) pemenuhan persyaratan hukum dan peraturan yang biasa (Arens, 2008). Untuk meningkatkan pemerintahan Dalam kinerja, perlu diciptakan sistem pengendalian intern pemerintah agar instansi pemerintah dapat mengetahui tentang dana masyarakat digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya pengendalian internal, secara keseluruhan Proses evaluasi, pemantauan dan kegiatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

pengawasan lainnya pada organisasi dapat dijadikan tolak ukur efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dena Handayani, Dkk (2020) menyatakan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Dharmawan dan Supriatna (2016), Pujiono et al. (2016), Fitrawati et al. (2017). untuk mendukung akuntabilitas diperlukan sistem pengendalian internal dan eksternal yang prima dan akuntabilitas publik hanya dapat diwujudkan dengan adanya sistem pengawasan yang memadai dari pemerintah dan menuntut adanya sistem pengawasan yang independen dan objektif. Maka hipotesis yang di ajukan adalah:

**H1: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

**2.11.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah**

Sistem akuntansi pada pemerintah daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat dan peluang penggunaannya secara luas, maka dapat digunakan untuk membuka kesempatan bagi para pihak jika akan mengelola, mengakses, dan mengaktifkan maupun mengaktifkan informasi yang terkait dengan keuangan daerah secara tepat dan cepat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka dapat mempercepat proses penyajian laporan keuangan sehingga dapat tepat waktu diselesaikan dan lebih akurat datanya. pengolahan data dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil penggunaannya maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multi-processing*.

Menurut Perdana (2018) Pemanfaatan teknologi informasi merupakan keadaan atau sikap seorang akuntan untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup (pengolahan data, pengolahan informasi, system manajemen dan proses kerja secara elektronik.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi berbagai kesalahan karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis (Ariesta, 2013).

Dena Handayani et al (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi maka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat tersedia dengan cepat dan akurat, tidak hanya masyarakat yang dengan mudah mendapatkan informasi pemerintah pusat juga dapat dengan mudah memperoleh informasi guna meningkatkan potensi yang ada di daerah setempat. Dibutuhkan akuntabilitas kinerja yang baik dan bagus agar pemanfaatan teknologi informasi ini bisa tepat guna. Berdasarkan uraian tersebut maka di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## H2: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

### 2.1.3 Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah

Seluruh karyawan sub bagian keuangan pada satuan kerja perangkat daerah memiliki kewajiban untuk memahami dengan keseluruhan segala hal yang menjadi tugas pokok, fungsi, wewenang maupun tanggung jawabnya sehingga apabila terdapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan, mereka telah siap dan mampu untuk mengikuti perubahan tersebut. Secara substansi, kata komitmen sangat berkaitan dengan nilai dan sasaran serta mengandung makna suatu proses bagaimana nilai dan sasaran tersebut berhasil dicapai atau dapat dikatakan bahwa komitmen merupakan faktor penting yang digunakan untuk dapat meraih keberhasilan.

Salah satu metode untuk meningkatkan pengolahan informasi adalah meningkatkan tingkat keterlibatan anggota. Untuk keterlibatan anggota lebih tinggi dalam organisasi, salah satu alternatifnya adalah dengan meningkatkan komitmen organisasi mereka. Komitmen organisasi memiliki definisi lebih dari sekadar kepatuhan maupun kesetiaan, namun juga bersangkutan dengan hubungan aktif dan keinginan pegawai untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap organisasinya. Kontribusi yang bermanfaat dalam rangka mengelola keuangan negara adalah menghasilkan laporan keuangan yang transparan untuk mengungkapkan dan menyajikan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan serta segala kekayaan yang dikendalikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan harapan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Dena Handayani et al (2020) menyatakan bahwa komitmen suatu organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Artinya semakin tinggi komitmen organisasi maka kinerja akuntabilitas pemerintah juga akan meningkat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zodia (2015), Wardhana et al (2015), dan Febrian (2016). Komitmen organisasi dapat dilihat dari etos kerja dan loyalitas karyawan dalam menjalankan segala aktivitas. Komitmen organisasi ada jika individu dalam organisasi menyadari hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat posisi dan perannya. Pencapaian tujuan organisasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota organisasi secara kolektif.

Berdasarkan uraian tersebut di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

**2.11.4 Kompetensi Aparat Pemerintah Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah**

Kompetensi aparatur terkait aspek pribadi dari yang bersangkutan. Kompetensi yang dimiliki akan menentukan pencapaian kinerja seseorang. Aspek pribadi tersebut meliputi sifat, motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi yang dimiliki akan mengarahkan tingkah laku seseorang yang selanjutnya akan menghasilkan kinerja (Widyatama *et al.*, 2016). Kompetensi merupakan faktor internal yang penting untuk dipertimbangkan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan berkualitas jika dapat memenuhi empat karakteristik yaitu handal, relevan, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami. Agar laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memenuhi standar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka diperlukan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintahan yang *good governance* yaitu dengan adanya karyawan yang berkompeten di bidangnya sehingga mewujudkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif. Sumber daya manusia atau karyawan yang berkompeten diperlukan pemerintah daerah ketika sedang menyelenggarakan peran pemerintahan. Karyawan yang memiliki kompetensi tinggi akan mengerjakan fungsi dan tugas pokoknya secara sempurna. Dengan kompetensi yang dimilikinya, karyawan akan dapat mencukupi tolak ukur dan sasaran dari hasil kerja yang telah ditentukan. Karyawan yang berkompeten di bidang akuntansi (keuangan) akan mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memerlukan karyawan yang berkompeten agar laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan telah sesuai dengan karakteristik kualitatif informasi yang telah ditetapkan.

Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian Leny Nofianti (2014), Mada (2017) dan Widyatama (2017). Aziz dan Zuhro (2018) menyatakan bahwa kemampuan staf/sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian terdahulu tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### **H4: Kompetensi Aparat Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

##### **2.1.5 Kepatuhan Terhadap Regulasi Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah**

Kepatuhan terhadap aturan akuntansi dilihat sebagai tingkat kesesuaian prosedur manajemen aset organisasi, yaitu penerapan prosedur akuntansi, dan penyajian laporan keuangan disertai bukti pendukung dengan aturan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan standar akuntansi pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. Republik Indonesia No. 24/2005). Dengan demikian ketaatan mengandung arti kesediaan sikap dalam mengikuti berbagai prosedur dan regulasi yang telah ditentukan oleh otorisasi, dalam hal ini pemerintah. Dengan kesediaan untuk mematuhi dengan berbagai aturan dan prosedur tersebut akan menciptakan kondisi yang memungkinkan tidak terjadi kecurangan. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan adalah menaati seseorang dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara lembaga atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan bangsa dan Negara.

Penelitian Riantiarno dan Azlina (2011) menyatakan kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan. Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian Sri Pebrianti dan Nurma Aziza (2018). Kepatuhan terhadap regulasi oleh organisasi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan kemauan sikap dan pengertian dalam menaati berbagai aturan dan prosedur maka akan tercipta kondisi yang memungkinkan tidak terjadi kecurangan dan dapat meningkatkan akuntabilitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kinerja pemerintah. Salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memerlukan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Negara Anggaran (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

#### **H5: Kepatuhan Terhadap Regulasi berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

#### **2.11.6 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Dan Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan, perlu diciptakan sistem pengendalian intern pemerintah agar instansi pemerintah dapat mengetahui tentang dana masyarakat digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah guna mensejahterakan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi berbagai kesalahan karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis.

Komitmen organisasi dapat dilihat dari etos kerja dan loyalitas karyawan dalam menjalankan segala aktivitas. Artinya semakin tinggi komitmen organisasi maka kinerja akuntabilitas pemerintah juga akan meningkat. Selain itu,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kompetensi menggambarkan apa yang dilakukan di tempat kerja. Apa yang dikerjakan tersebut dijelaskan pada berbagai tingkatan dan diperinci standar tersebut untuk masing-masing tingkatan. kemampuan staf/sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Begitu juga dengan Kepatuhan terhadap regulasi oleh organisasi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan kemauan sikap dan pengertian dalam menaati berbagai aturan dan prosedur maka akan tercipta kondisi yang memungkinkan tidak terjadi kecurangan dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dari uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H6 : Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Dan Kepatuhan Regulasi Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian dengan pola

Uma Sekaran:

#### 3.1.1 Tujuan studi: Pengujian hipotesis

Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan (independensi) dua atau lebih faktor dalam situasi (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini menjelaskan hubungan variabel independent: Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Dan Kepatuhan Regulasi terhadap variable Dependent: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

#### 3.1.2 Jenis investigasi: Studi kausal

Jenis investigasi untuk penelitian ini adalah studi kausal. Yang disebut dengan studi kausal adalah jika peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Sekaran, 2006). Pada penelitian ini digunakan studi kausal untuk menyatakan bahwa variabel X menyebabkan Y. Jadi, jika variabel X dihilangkan atau diubah dengan cara tertentu masalah Y terpecahkan.

#### 3.1.3 Tingkat intervensi: Intervensi sedang

Pada penelitian ini peneliti menggunakan intervensi sedang karna peneliti tidak lagi berurusan dengan temuan korelasi namun ingin menentukan secara penuh hubungan kausal. Atau memanipulasi peristiwa normal dengan secara sengaja mengubah tingkat dukungan.

### 3.1.4 Situasi studi: Studi lapangan

Situasi studi untuk penelitian ini adalah studi eksperimen lapangan. Studi yang dilakukan untuk menentukan hubungan sebab-akibat menggunakan lingkungan alami yang sama (Sekaran,2006). Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada daerah di Kabupaten Bengkalis.

### 3.1.5 Unit analisis: Organisasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan unit analisis yaitu terhadap organisasi (instansi Pemerintah) dimana organisasi yang digunakan sebagai populasi adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkalis.

### 3.1.6 Horizon waktu: Studi cross sectional

Horizon waktu untuk melakukan penelitian ini adalah cross-selectional, sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran,2006)

### 3.1.7 Populasi dan Sampel Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif-eksplanatori, yaitu pendekatan yang digunakan peneliti disamping untuk menggali data dari responden, juga untuk menguji hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi dan menjelaskan hubungan kausal antara berbagai variabel melalui pengujian hipotesis (Sekaran dan Bougie, 2017).

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan struktural dan aparat yang memiliki peran dalam penyusunan anggaran pada setiap OPD di pemerintah Kabupaten Bengkalis yang tersebar di 42 OPD.

Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel menggunakan kriteria bahwa anggota populasi yang menjadi sampel adalah Masing-masing OPD yang akan diwakili oleh 2 orang aparat yakni Kepala Dinas/Sekretaris dan Kepala Bagian Keuangan/Bendahara. Berarti jumlah keseluruhan sampel yang di dapat dari penelitian ini sebanyak 84 sampel.

**Tabel 3.1**  
**Daftar OPD Dinas di Kabupaten Bengkalis**

No	Nama Instansi	Alamat	Keterangan
1	Sekretariat DPRD	Jl. Antara, Telp.0766-21080	Ditolak
2	Sekretariat Daerah	Jl. Ahmad Yani No.070, Telp. 0766-21258	Ditolak
3	Inspektorat	Jl. Antara, Telp. 0766-22054 Fax: 0766-21023	Diterima
4	Dinas Pendidikan	Jl. Pertanian	Diterima
5	Dinas Kesehatan	Jl. Pertanian No.06	Diterima
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Stastitik	Jl. Kartini No.012	Diterima
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Antara No.451, Telp.0766- 22224	Diterima
8	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Jl. Antara, Telp.0766-21072 Fax: 0766-21835	Diterima
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jl. Pertanian No.02, Telp.0766-23003 Fax: 0766-23059	Diterima
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Antara, Telp.0766-21057	Diterima
11	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jl. Pertanian, Telp. 0766- 22511	Diterima
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Jend A.Yani	Diterima
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Jl. Pertanian	Diterima

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Instansi	Alamat	Keterangan
	Perlindungan Anak		
14	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Antara No.437. TeLP.0766-21026	Diterima
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Pertanian	Diterima
16	Dinas Ketahanan Pangan	Jl. Pertanian No.561, Telp.0766-22513	Diterima
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Jl. Antara No.Telp/Fax: 0766-23615	Diterima
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Pertanian No.03, Telp. 0766-21064	Diterima
19	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jl. Hang Tuah No.08, Telp.23645 Faks.23644	Diterima
20	Dinas Perhubungan	Jl. Pramuka, Telp. 0766-21865, 7007411	Diterima
21	Dinas Sosial	Jl. Antara	Diterima
22	Badan Pendapatan Daerah	Jl. Jenderal Sudirman, Telp 0766-21000	Diterima
23	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jl. Pertanian	Diterima
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Pertanian No.062	Diterima
25	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan	Jl. Pertanian	Diterima
26	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Jl. Arief Rahman No.024, Telp.0766-21098, fax: 0766-22720	Ditolak
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Jl. Pertanian	Diterima
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Pertanian No.561, Telp. 0766-22513	Diterima
29	Dinas Perikanan	Jl. Pertanian	Diterima
30	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	Jl. Pertanian	Diterima
31	Dinas Pemadam Kebakaran	Jl. Ahmad Yani, Telp. 0766-23133	Ditolak
32	Kecamatan Bengkalis	Jl. Panglima Minal, Bengkalis	Ditolak
33	Kecamatan Bantan	Jl. Soekarno-Hatta Desa selatbaru	Ditolak
34	Kecamatan Bukit Batu	Jl. Jend.Sudirman Sungai Selari	Ditolak
35	Kecamatan Siak Kecil	Jl. Ismail Yusuf No.09 Lubuk Muda	Ditolak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

No	Nama Instansi	Alamat	Keterangan
36	Kecamatan Rupert	Jl. Pelajar Batu Panjang	Ditolak
37	Kecamatan Rupert Utara	Jl. Desa Tanjung Medang	Ditolak
38	Kecamatan Mandau	Jl. Jend. Sudirman No. 56 kota Duri	Ditolak
39	Kecamatan Pinggir	Jl. Bathin Muajolelo, Telp.0765-707147	Ditolak
40	Kecamatan Bandar Laksamana	Jl. Desa Tenggayun	Ditolak
41	Kecamatan Talang Muandau	Jl. Jend. Sudirman Desa Beringin	Ditolak
42	Kecamatan Bathin Solapan	Jl. Raya Duri-Dumai KM.19 Desa Sebarang	Ditolak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu bertujuan untuk menguji hipotesis yang berupa pengaruh antar variable. Di dalam penelitian ini pengaruh yang diteliti meliputi Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Dan Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket (kuesioner). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah jawaban responden atas kuesioner yang disebarkan langsung kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bekerja pada Kantor pemerintah kabupaten Bengkalis. Sumber data penelitian ini adalah skor total yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dikirim kepada OPD kabupaten Bengkalis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Pengumpulan data penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian survei. Penelitian survei adalah metode pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS. Penelitian ini menggunakan desain penampang tunggal. Dalam penelitian ini data dan informasi dikumpulkan dari responden melalui kuesioner.

### **3.4 Operasionalisasi Variabel**

Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tertentu di lapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran.

#### **3.4.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen (Y) adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

#### **3.4.2 Variabel Independen**

Variabel independen (X) adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen pada penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Komitmen Organisasi (X3), Kompetensi Aparat Pemerintah (X4), Dan Kepatuhan Regulasi (X5).

##### **3.4.2.1 Sistem Pengendalian Internal (X1)**

Sistem Pengendalian Internal (SPI) ditujukan untuk mencapai tujuan akuntabilitas kinerja yang baik bagi organisasi/pemerintahan, diantaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien dihasilkannya pelaporan keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang andal, terjaganya keamanan asset daerah/negara, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Tugas pengawas internal di tingkat daerah adalah mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam penyusunan instrument variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) mengacu pada penelitian Dena Handayani et al (2020).

#### 3.4.2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pada penelitian ini, variabel pemanfaatan teknologi informasi dijelaskan melalui dua indikator utama (yaitu komputer dan jaringan internet). Manfaat internet di bidang pemerintahan relatif be-ragam, salah satunya adalah mempermudah sistem administrasi. Sistem administrasi berbantuan internet menyediakan fasilitas pengiriman dan pengelolaan data secara on line sehingga memudahkan pengiriman data dan menyeragamkan sistem antar instansi pemerintah yang meliputi administrasi pelaporan, keuangan, kepegawaian dan lainnya.

Dalam penyusunan instrument variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) mengacu pada penelitian Dena Handayani et al (2020).

#### 3.4.2.3 Komitmen Organisasi (X3)

Antara komitmen organisasi dengan kinerja terdapat pengaruh yang positif dimana kinerja yang baik pastinya dilatar belakangi oleh komitmen yang kuat. Komitmen organisasi yang buruk tidak menghasilkan kinerja yang tinggi. Jadi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

semakin tinggi derajat komitmen organisasi semakin tinggi pula kinerja yang dicapainya. Dengan demikian di perlukan suatu komitmen yang baik agar tercapai akuntabilitas kinerja pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam penyusunan instrument variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) mengacu pada penelitian Dena Handayani et al (2020).

**3.4.2.4 Kompetensi Aparat Pemerintah (X4)**

Kompetensi Aparat pemerintah didefinisikan sebagai tingkat, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh aparat pemerintah dalam mengelola akuntabilitas pengelolaan dana/anggaran suatu daerah. Kompetensi aparat pemerintah dalam kinerja akuntabilitas di dasari oleh indicator pendidikan dan pengalaman kerja.

Dalam penyusunan instrument variabel Kompetensi Aparat Pemerintah (X4) mengacu pada penelitian Leny Nofianti & Novie Susanti Suseno (2014)

**3.4.2.5 Kepatuhan Regulasi (X5)**

Organisasi sektor public harus patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Ini semua dibutuhkan untuk mencapai akuntabilitas kinerja sesuai dengan regulasi/aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penyusunan instrument variabel Kepatuhan Regulasi (X5) mengacu pada penelitian Sri Pebrianti & Nurna Aziza (2018).

Secara umum teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah steknik skala *Likert*. Menurut Sugiyono (2016:132) “Skala *likert* yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.”

Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

**Tabel 3.2**  
**Skala Pengukuran**

Skala Likert	Ukuran
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-Ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

**Tabel 3.3**  
**operasional dan pengukuran variabel**

Variabel	Ukuran	Indikator	Pengukuran
Sistem Pengendalian Internal (X1) (Dena Mandayani et al. 2020)	1. Lingkungan Kontrol	1. Penegakan nilai integritas dan etika. 2. Komitmen terhadap kompetensi. 3. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. 4. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang sesuai.	Skala Likert



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Ukuran	Indikator	Pengukuran
	2. Risiko Penilaian	1. Gunakan mekanisme yang baik untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan internal. 2. Menilai faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko	
	3. Aktivitas Pengendalian	1. Tinjauan Kinerja. 2. Pengendalian fisik atas aset. 3. Penentuan dan evaluasi Indikator.	
	4. Informasi dan Komunikasi	1. Menyelenggarakan komunikasi dan informasi yang efektif. 2. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi secara terus menerus.	
	5. Monitoring	1. Pemantauan sistem kendali dilakukan melalui pemantauan terus menerus 2. Tindak lanjut atas rekomendasi audit hasil dan meninjau orang lain.	
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) (Dena Handayani et al. 2020)	1. Intensitas Pemanfaatan	1. Intensitas pemanfaatan komputer 2. Intensitas pemanfaatan internet	Skala Likert
	2. Pemanfaatan Frekuensi	1. Kecepatan dalam bekerja 2. Kecepatan dalam proses kerja	
	3. Jumlah penggunaan perangkat	1. Jumlah perangkat yang dimiliki 2. Kapasitas pemanfaatan perangkat	
Komitmen Organisasi (X3) (Dena Handayani et al. 2020)	1. Komitmen Afektif	1. Rasa Kepemilikan 2. Perasaan emosional melekat 3. Personal meaning	Skala Likert
	2. Komitmen Berkelanjutan	1. Pilihan 2. Manfaat	
	3. Komitmen Normatif	1. Keyakinan untuk kelayakan	
Kompetensi Aparat Pemerintah (X4)	1. Pendidikan Formal	1. Tingkat Pendidikan Formal Pegawai 2. Kesesuaian kompetensi bidang pendidikan	Skala Likert

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Ukuran	Indikator	Pengukuran
<p>Leny Nofianti &amp; Novie Susanti (Suseno, 2014)</p>	2. Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Pengetahuan Untuk melakukan pekerjaan dimasa yang akan datang</li> <li>Peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini.</li> </ol>	
	3. Pengalaman Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami akuntansi dan keuangan</li> <li>Memahami aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan.</li> </ol>	
<p>Kepatuhan terhadap Regulasi (X5) (Sri Pebrianti &amp; Nurna Aziza, 2018).</p>	1. Format laporan harus memenuhi persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan terhadap standar akuntabilitas pemerintahan</li> <li>Pelaporan akuntabilitas (Bentuk dan isi) yang seragam</li> <li>Menyajikan laporan kinerja berkala setiap akhir tahun anggaran</li> </ol>	Skala Likert
<p>Akuntabilitas kinerja Pemerintah (Y)</p>	1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hukum dan regulasi.</li> <li>Menerapkan regulasi dalam penyusunan anggaran dan belanja daerah.</li> </ol>	Skala Likert
	2. Proses Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan terhadap pelaporan.</li> <li>Pemanfaatan informasi kinerja.</li> <li>Adanya standar pelayanan.</li> </ol>	
	3. Akuntabilitas Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap program dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.</li> <li>Pertimbangkan program yang memberikan hasil optimal.</li> </ol>	
	4. Akuntabilitas Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja yang dilaporkan</li> <li>Keterlibatan kepemimpinan</li> </ol>	
	5. Akuntabilitas Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan anggaran dan belanja.</li> <li>Laporan keuangan disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.</li> <li>Laporan keuangan yang disajikan memberikan informasi keuangan yang</li> </ol>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Variabel	Ukuran	Indikator	Pengukuran
		relevan.	

Sumber: Kumpulan penelitian tahun 2014 – 2020

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yakni Uji asumsi klasik, ini dilakukan karena merupakan salah satu syarat untuk melakukan uji regresi linear berganda, agar menunjukkan hubungan yang valid dan tidak bias maka perlu pengujian asumsi klasik pada model regresi yang digunakan. Selain itu, uji regresi linear berganda digunakan karena variabel bebas (independent) yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu dan untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi.

#### 3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang menggunakan ukuran frekuensi sebagai alat untuk mendeskripsikan dan menggambarkan data responden.

#### 3.5.2 Uji Kualitas Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner, sehingga kualitas kuisioner, kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan dan faktor situasional merupakan suatu yang berperan sangat penting dalam penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat pengukur pada variabel yang akan diteliti. Jika alat yang dipakai dalam proses pengumpulan data tidak andal atau tidak bisa dipercaya, maka hasil penelitian yang didapat tidak akan bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu dalam penelitian ini diperlukannya uji reliabilitas dan uji validitas.

#### 3.5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu angket. Suatu angket dapat dikatakan valid apabila pernyataan-pernyataan yang terdapat pada angket mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket tersebut. Perhitungan uji validitas ini menggunakan program Stastitical Package for the Social Sciences (SPSS). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel untuk degree of freedom (df) =  $n - 2$ , dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2016).

#### 3.5.2.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu angket yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu angket dapat dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam peneliti ini dilakukan dengan cara pengukuran sekali saja. Pengukuran hanya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pernyataan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach's Alpha  $> 0.6$  (Ghozali 2016).

#### 3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik. Apabila uji asumsi klasik terpenuhi, maka analisis regresi dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilakukan. Penelitian ini menggunakan tiga pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang dipergunakan dalam penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid, dengan data yang digunakan secara teori adalah tidak bias, konsisten dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Ghozali, 2011).

#### 3.5.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Jika asumsi dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2016). Uji yang digunakan untuk uji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnoff (Ghozali, 2016), yaitu:

H<sub>0</sub>: Residual berdistribusi normal

H<sub>1</sub>: Residual tidak berdistribusi normal

Jika nilai signifikansi pada uji ini lebih besar dari 5%, maka H<sub>0</sub> diterima dan residual berdistribusi normal (Ghozali, 2016).

#### 3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Dapat dikatakan heteroskedastisitas apabila residual tersebut memiliki varians yang tidak sama, namun dikatakan homoskedastisitas apabila residual memiliki variance yang sama. Model regresi yang baik adalah yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser dengan cara meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Apabila nilai probabilitas (sig) > dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

### 3.5.3.3 Uji Multikolineraritas

Menurut Ghozali (2016), uji multikolineraritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabelvariabel ini tidak orthogonal. Pengujian multikolineraritas dapat diamati melalui Variable Inflation Factor (VIF) dengan syarat  $VIF < 10$ , maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolineraritas (Ghozali, 2016).

### 3.5.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi linier berganda bertujuan untuk meramalkan bagaimana naik turunnya variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi nilainya (Sugiyono, 2016).

Pengujian atas variabel-variabel penelitian menggunakan analisis regresi berganda dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara semua variabel independen (Sistem Pengendalian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Dan Kepatuhan Regulasi) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah secara simultan.

Kemudian dilakukan pengecekan dengan melakukan plot data untuk melihat adanya data yang linier atau tidak linier. Jika hasil regresi baik, maka hasil analisis regresi layak dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengetahuan atau untuk tujuan pemecahan masalah praktis. Persamaan regresi linier adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e;$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

$\alpha$  = Bilangan konstanta

$\beta$  = koefisien garis regresi

X1 = Sistem Pengendalian Internal

X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X3 = Komitmen Organisasi

X4 = Kompetensi Aparat Pemerintah

X5 = Kepatuhan terhadap Regulasi

e = Error

### 3.5.4 Uji Hipotesis

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Ghozali, 2011). Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan analisis regresi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F merupakan sebuah metode untuk menguji apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama/stimultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai F dan nilai signifikansi p. Jika hasil analisis menunjukkan nilai  $p \leq 0,05$  maka model persamaan regresinya signifikan pada level alfa sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linear berganda sudah tepat. Sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan nilai  $p > 0,05$  maka model persamaan regresinya tidak signifikan pada level alfa 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linear berganda belum tepat. Uji model ini merupakan uji yang harus dipenuhi terlebih dahulu signifikansinya sebelum melanjutkan ke uji signifikansi variabel (uji t), uji F ini bersifat *necessary condition*, yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji signifikansi variabel.

### 3.5.4.2 Uji Signifikansi Variabel (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing (secara individu/parsial) variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini merupakan uji lanjutan yang dapat dilakukan setelah ada kepastian uji modelnya (uji F) hasilnya signifikansi. Kriteria signifikansi variabel untuk teknik analisis regresi linear berganda sama dengan kriteria signifikansi pada teknik analisis regresi linear sederhana. Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai t dan nilai signifikansi p. Jika hasil analisis menunjukkan nilai  $p \leq 0,05$  maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah secara statistik signifikan pada level alfa sebesar 5%. Sebaliknya, jika hasil analisis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan nilai  $p > 0,05$  maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya secara statistik tidak signifikan. Interpretasi teori dan empiris hubungan/pengaruh/dampak variabel independen terhadap dependennya dengan melihat tanda (positif atau negatif) pada nilai koefisien regresinya.

### 3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi diantara nol dan satu. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperdiksi variasi terikat (Ghozali, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lima variabel independen yaitu Sistem pengendalian internal, Pemanfaatan teknologi informasi, Komitmen organisasi, Kompetensi aparat pemerintah dan Kepatuhan Regulasi terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel menggunakan kriteria. Responden penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Kabupaten Bengkalis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket (kuesioner) yang di sebar ke masing-masing instansi sehingga dengan sampel berjumlah 54 orang.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan pada penelitian ini, dengan menggunakan metode regresi linier berganda maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel system pengendalian internal memiliki nilai sig sebesar  $0,021 < 0,05$  dan nilai  $\beta$   $0,094$  . Hal ini menunjukan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah. Ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan suatu kinerja dalam pemerintahan, perlu diciptakan sistem pengendalian intern pemerintah agar instansi pemerintah dapat membarikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Variabel Pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai sig sebesar 0,047 < 0,05 dan nilai  $\beta$  0,233 . Hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi maka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat tersedia dengan cepat dan akurat, tidak hanya masyarakat yang dengan mudah mendapatkan informasi pemerintah pusat juga dapat dengan mudah memperoleh informasi guna meningkatkan potensi yang ada di daerah setempat. Dibutuhkan akuntabilitas kinerja yang baik dan bagus agar pemanfaatan teknologi informasi ini bisa tepat guna.
3. Variabel Komitmen organisasi memiliki nilai sig sebesar 0,025 < 0,05 dan nilai  $\beta$  0,260 . Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah. untuk mencapai Komitmen dalam suatu organisasi kita dapat dilihat dari etos kerja dan loyalitas karyawan dalam menjalankan segala aktivitas. Komitmen organisasi ada jika individu dalam organisasi menyadari hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat posisi dan perannya. Oleh karena itu semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin tinggi pula lah kinerja akuntabilitas pemerintah pada suatu daerah
4. Variabel Kompetensi aparat pemerintah memiliki nilai sig sebesar 0,022 < 0,05 dan nilai  $\beta$  0,357 . Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi aparat pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah. variabel kompetensi aparat pemerintah mutlak diperlukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam akuntabilitas kinerja pemerintah agar pengelolaan dana suatu daerah untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan daerah yang optimal.

5. Variabel Kepatuhan terhadap regulasi memiliki nilai sig sebesar  $0,033 < 0,05$  dan nilai  $\beta$   $0,390$ . Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam melaksanakan kinerja akuntabilitas pemerintah suatu daerah sudah seharusnya berpatokan pada regulasi/aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kepatuhan terhadap regulasi oleh organisasi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan kemauan sikap dan pengertian dalam menaati berbagai aturan dan prosedur maka akan tercipta kondisi yang memungkinkan tidak terjadi kecurangan dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

6. Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan probabilitas signifikansi  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa Sistem pengendalian internal, Pemanfaatan teknologi informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi aparat pemerintah, dan kepatuhan regulasi secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah. OPD yang sadar akan pentingnya pengaruh dari variabel-variabel yang jelaskan diatas maka akan melaksanakan kinerja akuntabilitas nya dengan baik dan transparan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi arahan untuk penelitian selanjutnya. Berikut beberapa keterbatasan dari penelitian ini :

1. Ruang lingkup dan responden yang terdapat dalam penelitian ini hanya bersumber dari OPD dinas yang ada di daerah kabupaten Bengkalis saja.
2. Dalam penelitian ini tidak semua responden mengisi kuisisioner, hanya 54 dari 84 orang OPD pada instansi di kabupaten Bengkalis
3. Adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan kan ruang gerak peneliti terbatas untuk melakukan penelitian di beberapa instansi pemerintah di kabupaten Bengkalis.

## 5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal atau menambahkan variabel moderating guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen. Sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan pengaruh-pengaruh variabel dependen yang sebenarnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti metode wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang lebih berkualitas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atkins, K. S. 2012. Determinants of Auditee Adoption of Audit Recommendations: Local Government Auditors Perspective. *Journal of Budgeting, Accounting, and Financial Management*. pp: 195-220.
- Al-Qur'an Surah Al zalzalah Ayat 7-8
- Al-Qur'an Surah Al-Hujarat Ayat 6
- Al-Quran Surah Al-Isra Ayat 36
- Angel M., Grace B. Nangoi, dan Jenny Morasa, (2017). Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal Riset Ak dan Auditing*, Vol. 8, No. 2, hal 20-29.
- Aziz, M.N, & Prasiti, S.D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa( Studi Empiris Pada Kec. Sumbergempol, Kab. Tulung Agung). *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol. 06. No. 02 Juli 2019: 280-344
- Darmawan, Rizki. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Di Skpd Kabupaten Bengkalis. *JOM Fekon*. Vol. 3 No.1
- Handayani, D., & Yudianto, I. (2020). The Influence of Internal Control System, Information Technology Utilization, and Organizational Commitment on Government Accountability Performance. *Journal Of Accounting Auditing and Business*, Vol. 3(2), 17–29.
- Hamyanto, Ibnu. 2020. “Kasus Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Nonaktif Segera Disidang” <https://news.detik.com/berita/d-5040918/kasus-suap-proyek-jalan-bupati-nonaktif-bengkalis-segera-disidang>. Diakses pada 15 Desember 2020, Pukul 16.25 Wib.
- Ikkal, T.S.m. 2018. “Ini Adalah 53 Desa di Kabupaten Bengkalis Terkena Sanksi Pemotongan Anggaran P3ID Tahun 2018”. <https://rri.co.id/bengkalis/daerah/681833/ini-adalah-53-des-a-di-kabupaten-bengkalis-terkena-sangsi-pemotongan-anggaran-p3id-tahun-2018>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 09.46 Wib
- Klot, L., Akuntansi, D., Victoria, U., & Melbourne, K. (1999). Perfomance Measurement and Accountability In Victorian Local Government. *The International Journal Of Public Sector Management*, Vol. 12. No. 07. Pp 565-583

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- LAN BPKP - Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI. (2004). *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul 1, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta
- LAN, BPKP, 2003, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Latifah, N.P. (2010). Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi *Agency Theory* di Sektor Publik?. *Fokus Ekonomi* Vol. 5 No.2 Desember 2010: 85 - 94.
- Mardiasmo. 2006. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UAD Press.
- Mulyadi, 2014. *Audit 1*, Edisi ke-6. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Nadila, Zuraifa et al (2021). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal* Vol. 2 No. 2.
- Ningtyas, H. I. R., & Roekhudin, W. A. (2019). The Effect Of Government Internal Control System And Government Accounting System On Performance Accountability With The Financial Quality Statements As Intervening Variables (Case Study: The Government Of Lumajang Regency, East Java). *International Journal Of Business Economic and Law*. Vol. 18(5), 179–187.
- Nofianti, L., & Susanti, N. (2014). Factors affecting implementation of good government governance ( GGG ) and their implications towards performance accountability. *International Conference On Accounting Studies Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 98–105.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 pasal 3 ayat 2 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 47 Tahun 2011 Pasal 4 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional bahwasannya fungsi Pengawasan Internal
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Pratiwi, Umami. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal riset akuntansi dan keuangan*, 6 (3), 2018, 429-440

Pratiwi, Widya. (2012). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern. *Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim*. Bukittinggi.

Purpa, Dwi Fitri, & R. A., & Prasetyo. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*. Vol. 20(2), 281–297.

Sani, Abdullah, (2021)” Kadis ESDM Pemrov Riau Ditahan atas Dugaan Korupsi Bimtek Fiktif ” <https://www.merdeka.com/peristiwa/kadis-esdm-pemrov-riau-ditahan-atas-dugaan-korupsi-bimtek-fiktif.html>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 20.00 wib

Sawyer, Lawrence B, Dittenhofer Mortimer A, Scheiner James H, 2006, *Internal Auditing*, Diterjemahkan oleh : Ali Akbar, Jilid 3, Edisi 5, Salemba Empat : Jakarta.

Sekaran, Uma. (2009). *Research Methode For Business*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Penerbit ALFABETA. Bandung.

Sugiyono. (2016). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta

Syahputri, Y., Bilqis R, M. H., Dalimunthe, H., Sabrina, H., & Rahmadhani, S. N. (2019). Factors that Influence the Reality of Performance Accountability in Government Institutions (Empirical Study in Government Deli Serdang District). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, Vol. 2(1), 263–270.

Tooley, S., Hooks, J., & Basnan, N. (2010). Stakeholders’ perceptions on the accountability of Malaysian local authorities. In *Advances in Public Interest Accounting* (Vol. 15). Elsevier.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah

Wahyuni, E.S. dan Dkk. (2016). Pengaruh Budaya Organisasi, *Locus Of Control*, Stres Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



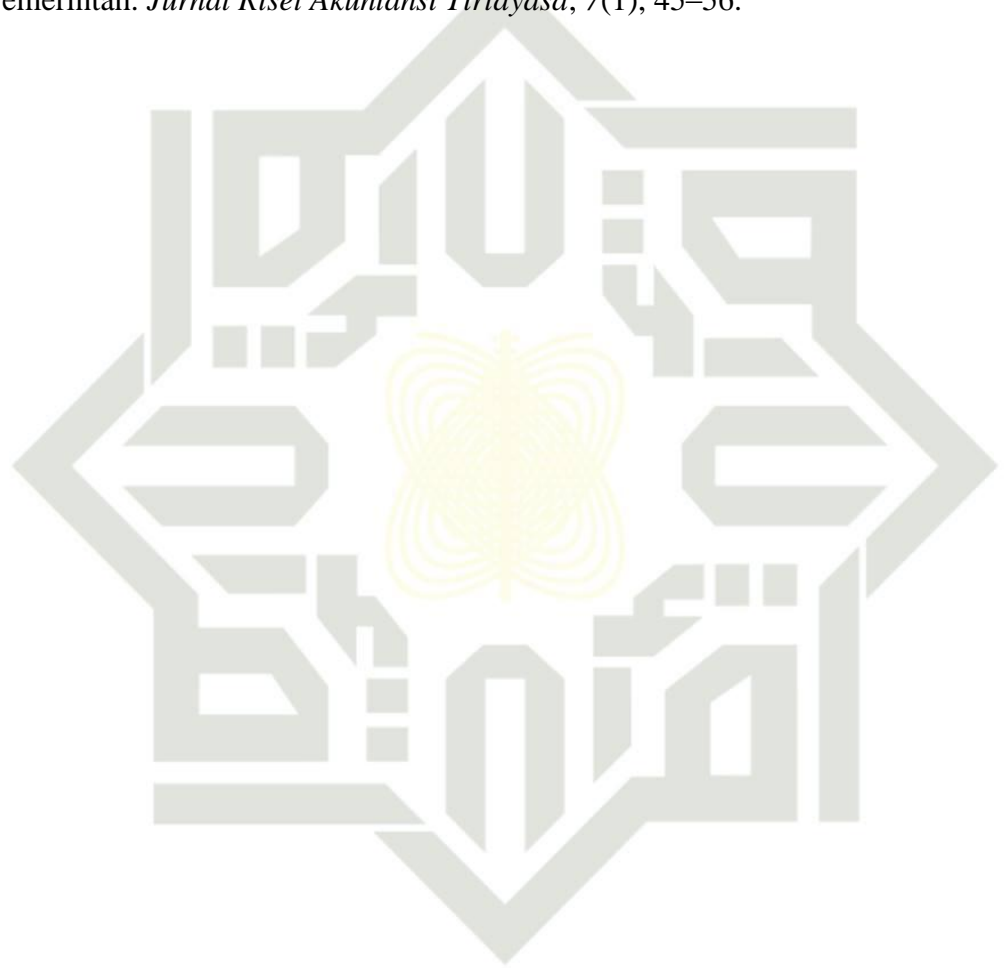
#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Manajemen*. Volume XX, No.02, Juni 2016: 189-206

Widyatama, A., & Novita, L. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa ( ADD ). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 02(02), 1–20.

Zulfandi, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 7(1), 45–56.



UIN SUSKA RIAU





## HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pengendalian Internal	54	32.00	65.00	50.7778	7.31931
Pemanfaatan Teknologi Informasi	54	8.00	20.00	14.7222	2.42173
Komitmen Organisasional	54	22.00	40.00	31.1111	4.11929
Kompetensi Aparat Pemerintah	54	13.00	25.00	18.7593	2.65597
Kepatuhan Terhadap Regulasi	54	7.00	15.00	11.5185	2.02569
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	54	20.00	35.00	27.2037	3.40576
Valid N (listwise)	54				

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL UJI VALIDITAS

$R_{\text{Tabel}} = 0,2632$

$R_{\text{hitung}} > R_{\text{Tabel}}$

### 1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y) (VALID)

#### Correlation

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Y.1	Pearson Correlation	1	.509(*)	.345(*)	.298(*)	.222	.081	.127	.637(**)
	Sig. (2-tailed)		.000	.011	.029	.107	.562	.361	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
Y.2	Pearson Correlation	.509(*)	1	.489(*)	.163	.391(*)	.200	.150	.698(**)
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.238	.003	.147	.278	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
Y.3	Pearson Correlation	.345(*)	.489(*)	1	.334(*)	.235	.199	.339(*)	.708(**)
	Sig. (2-tailed)	.011	.000		.014	.087	.148	.012	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
Y.4	Pearson Correlation	.298(*)	.163	.334(*)	1	.412(*)	.204	.067	.562(**)
	Sig. (2-tailed)	.029	.238	.014		.002	.139	.630	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
Y.5	Pearson Correlation	.222	.391(*)	.235	.412(*)	1	.166	.200	.604(**)
	Sig. (2-tailed)	.107	.003	.087	.002		.230	.147	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
Y.6	Pearson Correlation	.081	.200	.199	.204	.166	1	.439(*)	.491(**)
	Sig. (2-tailed)	.562	.147	.148	.139	.230		.001	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
Y.7	Pearson Correlation	.127	.150	.339(*)	.067	.200	.439(*)	1	.549(**)
	Sig. (2-tailed)	.361	.278	.012	.630	.147	.001		.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Pearson Correlation	.637(*)	.698(*)	.708(*)	.562(*)	.604(*)	.491(*)	.549(*)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	54	54	54	54	54	54	54	54

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sistem Pengendalian Internal (X1) (VALID)

### Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	Sistem Pengendalian Internal
X1.1	Pearson Correlation	1	.569 (**)	.158	.167	.514 (**)	.611 (**)	.408 (**)	.074	.170	.393 (**)	.231	.233	.173	.566(**)
	Sig. (2-tailed)		.000	.253	.226	.000	.000	.002	.595	.219	.003	.093	.091	.210	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.2	Pearson Correlation	.569 (**)	1	.328 (*)	.393 (**)	.631 (**)	.462 (**)	.722 (**)	.286 (*)	.275 (*)	.411 (**)	.420 (**)	.278 (*)	.169	.710(**)
	Sig. (2-tailed)	.000		.016	.003	.000	.000	.000	.036	.044	.002	.002	.042	.223	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.3	Pearson Correlation	.158	.328 (*)	1	.358 (**)	.295 (*)	.184	.246	.890 (**)	.442 (**)	.356 (**)	.277 (*)	.304 (*)	.295(*)	.670(**)
	Sig. (2-tailed)	.253	.016		.008	.030	.183	.072	.000	.001	.008	.042	.025	.030	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.4	Pearson Correlation	.167	.393 (**)	.358 (**)	1	.523 (**)	.140	.307 (*)	.346 (*)	.672 (**)	.274 (*)	.275 (*)	.457 (**)	.028	.589(**)
	Sig. (2-tailed)	.226	.003	.008		.000	.312	.024	.010	.000	.045	.044	.001	.841	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.5	Pearson Correlation	.514 (**)	.631 (**)	.295 (*)	.523 (**)	1	.482 (**)	.537 (**)	.298 (*)	.488 (**)	.664 (**)	.498 (**)	.450 (**)	.049	.755(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.030	.000		.000	.000	.029	.000	.000	.000	.001	.724	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.6	Pearson Correlation	.611 (**)	.462 (**)	.184	.140	.482 (**)	1	.688 (**)	.220	.236	.480 (**)	.269 (*)	.415 (**)	.070	.624(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.183	.312	.000		.000	.111	.086	.000	.049	.002	.614	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.7	Pearson Correlation	.408 (**)	.722 (**)	.246	.307 (*)	.537 (**)	.688 (**)	1	.290 (*)	.408 (**)	.614 (**)	.417 (**)	.479 (**)	.042	.721(**)
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.072	.024	.000	.000		.034	.002	.000	.002	.000	.761	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.8	Pearson Correlation	.074	.286 (*)	.890 (**)	.346 (*)	.298 (*)	.220	.290 (*)	1	.479 (**)	.318 (*)	.211	.330 (*)	.199	.639(**)
	Sig. (2-tailed)	.595	.036	.000	.010	.029	.111	.034		.000	.019	.125	.015	.148	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.9	Pearson Correlation	.170	.275 (*)	.442 (**)	.672 (**)	.488 (**)	.236	.408 (**)	.479 (**)	1	.591 (**)	.482 (**)	.674 (**)	.191	.668(**)
	Sig. (2-tailed)	.219	.044	.001	.000	.000	.086	.002	.000		.000	.000	.000	.166	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.10	Pearson Correlation	.393 (**)	.411 (**)	.356 (**)	.274 (*)	.664 (**)	.480 (**)	.614 (**)	.318 (*)	.591 (**)	1	.572 (**)	.504 (**)	.080	.709(**)
	Sig. (2-tailed)	.003	.002	.008	.045	.000	.000	.000	.019	.000		.000	.000	.567	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

1. Hak Cipta Dilindungi
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. **Hal**
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X1.11	Pearson Correlation	.231	.420 (**)	.277 (*)	.275 (*)	.498 (**)	.269 (*)	.417 (**)	.211	.482 (**)	.572 (**)	1	.559 (**)	.028	.611(**)
	Sig. (2-tailed)	.093	.002	.042	.044	.000	.049	.002	.125	.000	.000		.000	.839	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.12	Pearson Correlation	.233	.278 (*)	.304 (*)	.457 (**)	.450 (**)	.415 (**)	.479 (**)	.330 (*)	.674 (**)	.504 (**)	.559 (**)	1	.074	.653(**)
	Sig. (2-tailed)	.091	.042	.025	.001	.001	.002	.000	.015	.000	.000	.000		.595	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X1.13	Pearson Correlation	.173	.169	.295 (*)	.028	.049	.070	.042	.199	.191	.080	.028	.074	1	.286(*)
	Sig. (2-tailed)	.210	.223	.030	.841	.724	.614	.761	.148	.166	.567	.839	.595		.036
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Sistem Pengendalian Internal	Pearson Correlation	.566 (**)	.710 (**)	.670 (**)	.589 (**)	.755 (**)	.624 (**)	.721 (**)	.639 (**)	.668 (**)	.709 (**)	.611 (**)	.653 (**)	.286(*)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.036	
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) (VALID)

#### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Pemanfaatan Teknologi Informasi
X2.1	Pearson Correlation	1	.396(**)	.251	.275(*)	.719(**)
	Sig. (2-tailed)		.003	.068	.045	.000
	N	54	54	54	54	54
X2.2	Pearson Correlation	.396(**)	1	.303(*)	.208	.708(**)
	Sig. (2-tailed)	.003		.026	.131	.000
	N	54	54	54	54	54
X2.3	Pearson Correlation	.251	.303(*)	1	.260	.635(**)
	Sig. (2-tailed)	.068	.026		.058	.000
	N	54	54	54	54	54
X2.4	Pearson Correlation	.275(*)	.208	.260	1	.653(**)
	Sig. (2-tailed)	.045	.131	.058		.000
	N	54	54	54	54	54
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pearson Correlation	.719(**)	.708(**)	.635(**)	.653(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	54	54	54	54	54

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### 4. Komitmen Organisasional (X3) (VALID)

##### Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	Komitmen Organisasional
X3.1	Pearson Correlation	1	.339(*)	.196	.377(*)	.333(*)	.281(*)	-.040	-.072	.510(**)
	Sig. (2-tailed)		.012	.155	.005	.014	.039	.774	.605	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X3.2	Pearson Correlation	.339(*)	1	.620(*)	.163	.223	.355(*)	.229	.107	.658(**)
	Sig. (2-tailed)	.012		.000	.240	.105	.008	.095	.443	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X3.3	Pearson Correlation	.196	.620(*)	1	-.082	.178	.410(*)	.109	.207	.575(**)
	Sig. (2-tailed)	.155	.000		.557	.199	.002	.434	.134	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X3.4	Pearson Correlation	.377(*)	.163	-.082	1	.702(*)	.120	.079	.076	.549(**)
	Sig. (2-tailed)	.005	.240	.557		.000	.389	.571	.584	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X3.5	Pearson Correlation	.333(*)	.223	.178	.702(*)	1	.226	.064	.138	.648(**)
	Sig. (2-tailed)	.014	.105	.199	.000		.101	.645	.319	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X3.6	Pearson Correlation	.281(*)	.355(*)	.410(*)	.120	.226	1	.326(*)	.236	.633(**)
	Sig. (2-tailed)	.039	.008	.002	.389	.101		.016	.086	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X3.7	Pearson Correlation	-.040	.229	.109	.079	.064	.326(*)	1	.552(*)	.514(**)
	Sig. (2-tailed)	.774	.095	.434	.571	.645	.016		.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
X3.8	Pearson Correlation	-.072	.107	.207	.076	.138	.236	.552(*)	1	.480(**)
	Sig. (2-tailed)	.605	.443	.134	.584	.319	.086	.000		.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Komitmen Organisasional	Pearson Correlation	.510(*)	.658(*)	.575(*)	.549(*)	.648(*)	.633(*)	.514(*)	.480(*)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 5. Kompetensi Aparat Pemerintah (X4) (VALID)

		Correlations					Kompetensi Aparat Pemerintah
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
X4.1	Pearson Correlation	1	.552(**)	.497(**)	.034	.128	.727(**)
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.806	.357	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X4.2	Pearson Correlation	.552(**)	1	.553(**)	.178	.010	.724(**)
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.198	.940	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X4.3	Pearson Correlation	.497(**)	.553(**)	1	.221	-.075	.688(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.108	.592	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X4.4	Pearson Correlation	.034	.178	.221	1	.297(*)	.571(**)
	Sig. (2-tailed)	.806	.198	.108		.029	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X4.5	Pearson Correlation	.128	.010	-.075	.297(*)	1	.414(**)
	Sig. (2-tailed)	.357	.940	.592	.029		.002
	N	54	54	54	54	54	54
Kompetensi Aparat Pemerintah	Pearson Correlation	.727(**)	.724(**)	.688(**)	.571(**)	.414(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.002	
	N	54	54	54	54	54	54

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 6. Kepatuhan Terhadap Regulasi (X5)

		Correlations			Kepatuhan Terhadap Regulasi
		X5.1	X5.2	X5.3	
X5.1	Pearson Correlation	1	.433(**)	.555(**)	.805(**)
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.000
	N	54	54	54	54
X5.2	Pearson Correlation	.433(**)	1	.667(**)	.836(**)
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000
	N	54	54	54	54
X5.3	Pearson Correlation	.555(**)	.667(**)	1	.870(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	54	54	54	54
Kepatuhan Terhadap Regulasi	Pearson Correlation	.805(**)	.836(**)	.870(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N	54	54	54	54
---	----	----	----	----

#### Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)	0.716	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X1)	0.856	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0.610	Reliabel
Komitmen Organisasional (X3)	0.702	Reliabel
Kompetensi Aparat Pemerintah (X4)	0.607	Reliabel
Kepatuhan Terhadap Regulasi (X5)	0.779	Reliabel

#### Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.81993891
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.055
	Negative	-.083
Kolmogorov-Smirnov Z		.613
Asymp. Sig. (2-tailed)		.846

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil olahan data primer, 2021

UIN SUSKA RIAU

## Uji Heteroskedastisitas

### Coefficients(a)

Sig > 0,05

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Collinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.255	1.696		3.099	.003		
Sistem Pengendalian Internal	-.045	.023	-.290	-1.948	.057	.831	1.203
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.066	.066	-.143	-.998	.323	.903	1.107
Komitmen Organisasional	.019	.065	.069	.289	.774	.323	3.096
Kompetensi Aparat Pemerintah	-.065	.087	-.154	-.748	.458	.434	2.303
Kepatuhan Terhadap Regulasi	.004	.103	.007	.036	.972	.529	1.891

a. Dependent Variable: Abs\_Ut

Sumber: Hasil olahan data primer, 2021

## Uji Multikolineraritas

### Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Collinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.276	2.913		-.095	.925		
Sistem Pengendalian Internal	.094	.039	.202	2.389	.021	.831	1.203
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.233	.114	.166	2.040	.047	.903	1.107
Komitmen Organisasional	.260	.112	.314	2.315	.025	.323	3.096
Kompetensi Aparat Pemerintah	.357	.150	.278	2.377	.022	.434	2.303
Kepatuhan Terhadap Regulasi	.390	.178	.233	2.196	.033	.529	1.891

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sumber: Hasil olahan data primer, 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Analisis Regresi Linier Berganda

### Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	<b>-.276</b>	2.913		-.095	.925		
Sistem Pengendalian Internal	<b>.094</b>	.039	.202	2.389	.021	.831	1.203
Pemanfaatan Teknologi Informasi	<b>.233</b>	.114	.166	2.040	.047	.903	1.107
Komitmen Organisasional	<b>.260</b>	.112	.314	2.315	.025	.323	3.096
Kompetensi Aparat Pemerintah	<b>.357</b>	.150	.278	2.377	.022	.434	2.303
Kepatuhan Terhadap Regulasi	<b>.390</b>	.178	.233	2.196	.033	.529	1.891

a Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sumber: Hasil olahan data primer, 2021

### Uji Simultan(Uji F)

Sig < 0,05

### ANOVA(b)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	439.214	5	87.843	24.019	<b>.000(a)</b>
Residual	175.545	48	3.657		
Total	614.759	53			

a Predictors: (Constant), Kepatuhan Terhadap Regulasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi

b Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sumber: Hasil olahan data primer, 2021



## Uji Signifikansi Variabel (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.276	2.913		-.095	.925		
Sistem Pengendalian Internal Pemanfaatan Teknologi Informasi	.094	.039	.202	2.389	<b>.021</b>	.831	1.203
Komitmen Organisasional	.233	.114	.166	2.040	<b>.047</b>	.903	1.107
Kompetensi Aparat Pemerintah	.260	.112	.314	2.315	<b>.025</b>	.323	3.096
Kepatuhan Terhadap Regulasi	.357	.150	.278	2.377	<b>.022</b>	.434	2.303
	.390	.178	.233	2.196	<b>.033</b>	.529	1.891

a Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

## Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.845(a)	.714	<b>.685</b>	1.91238	2.200

a Predictors: (Constant), Kepatuhan Terhadap Regulasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi

b Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sumber: Hasil olahan data primer, 2021

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Sultan Syarif Kasim Riau

**KUESIONER PENELITIAN**

“Pengaruh system pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi. Kompetensi aparat pemerintah dan kepatuhan regulasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah”.

Isilah dengan singkat dan jelas berdasarkan diri Bapak/Ibu dengan memberi tanda (✓) pada jawaban yang telah disediakan.

Nama INSTANSI :

Nama Responden (jika tidak keberatan) :

Umur :

Jenis Kelamin Anda :

☐ Pria

☐ Wanita

Pendidikan Anda :

☐ S3

☐ S2

☐ S1

☐ D3

☐ lainnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Posisi Anda saat ini adalah :

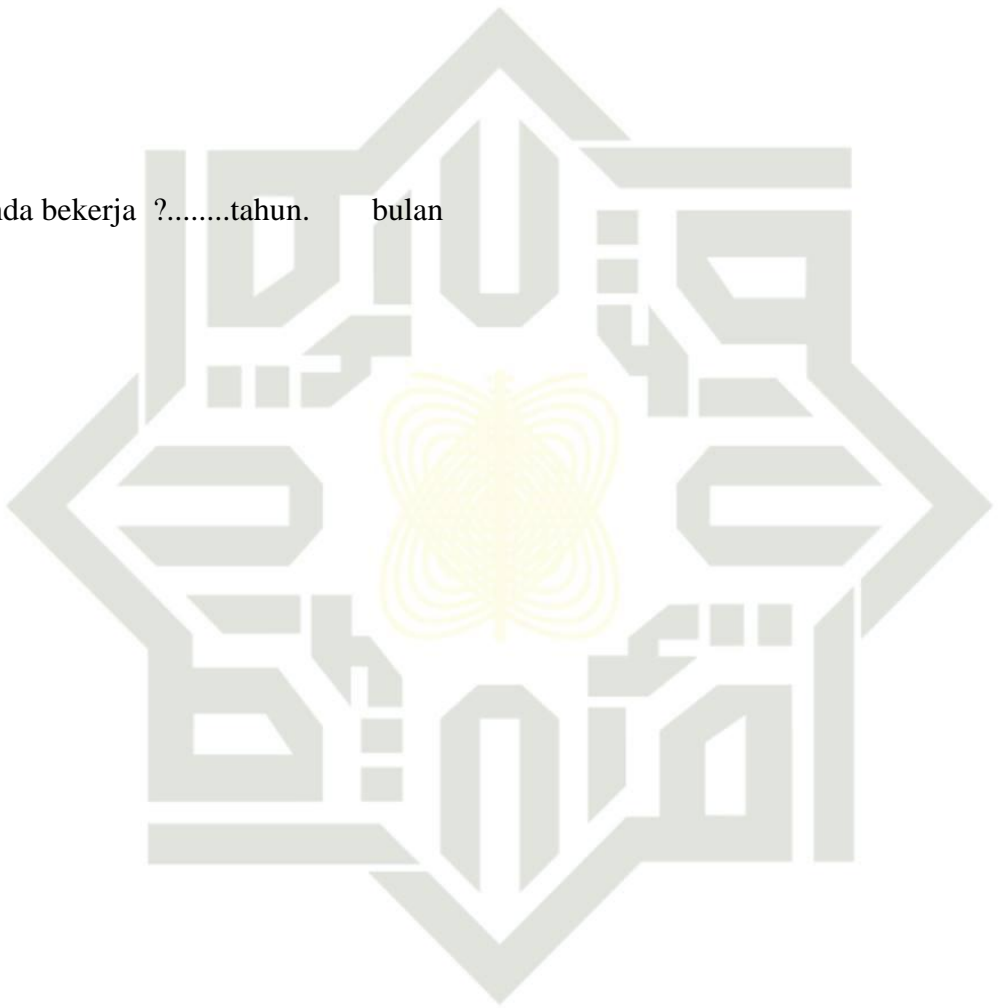
Kepala Bagian

Sekretaris

Bendahara

Staff.

Berapa lama Anda bekerja ?.....tahun.      bulan



UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Dilindungi UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERTANYAAN KUESIONER**

Petunjuk : Mohon Bapak / Ibu / Saudara menjawab pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri Bapak / Ibu / Saudara.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

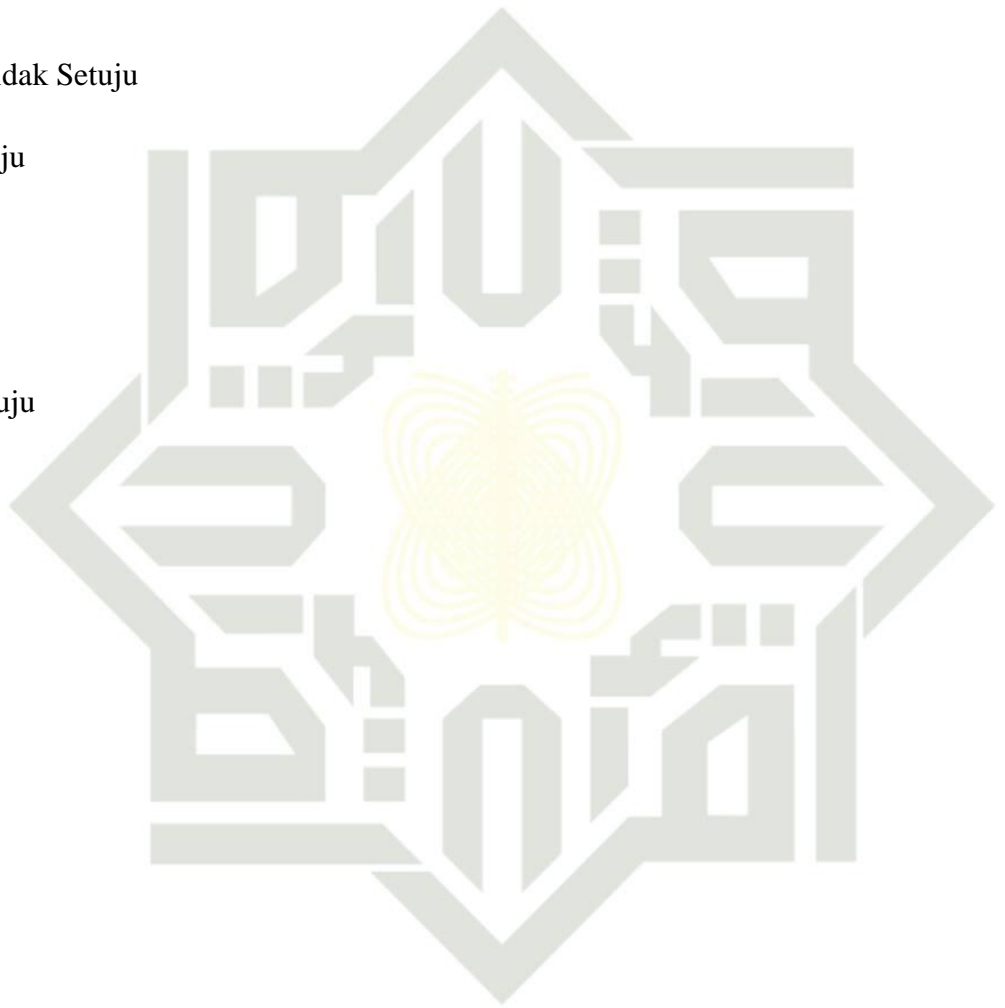
TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## SISTEM PENGENDALIAN INTEERNAI (X1)

No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
	<b>Lingkungan Kontrol</b>					
1	System pengendalian internal menegakkan nilai integritas dan etika					
2	Sistem pengendalian internal membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan					
3	Adanya system pengendalian internal mengurangi terjadinya kesalahan dalam mencapai tujuan suatu instansi pemerintah					
	<b>Risiko Penilaian</b>					
4	Kepala bagian telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap system akuntansi dan pelaporan keuangan					
5	Aparat pemerintah selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap system dan prosedur akuntansi					
	<b>Aktivitas Pengendalian</b>					
6	Semua transaksi yang dientry dan diproses ke dalam computer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi					
7	Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik					
8	Kepala bagian telah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan pengamanan aset infrastruktur					
	<b>Informasi dan Komunikasi</b>					
9	System pengendalian internal dapat menyampaipkan informasi kepada semua personel dengan baik					
10	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat					
11	Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan dan aparat pengawas internal dalam memberikan masukan signifikan					
	<b>Monitoring</b>					
12	Pengawasan pada SKPD Kab. Bengkalis sudah berjalan dengan baik					
13	Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian internal aparat pemerintah telah melakukan perbaikan pengendalian internal					

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (X2)**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Penggunaan komputer menunjang pelaksanaan tugas aparat pemerintah					
2	Akses internet memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas aparat pemerintah					
3	Proses pelayanan public di bantu oleh jumlah perangkat dalam struktur yang dimiliki					
4	Kecepatan proses bekerja tergantung pada teknologi yang dimiliki oleh instansi pemerintah					

**KOMITMEN ORGANISASIONAL (X3)**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Merasa nyaman dalam organisasi ini					
2	Pimpinan dan pegawai harus memiliki integritas dan nilai ethis yang tinggi					
3	Manajemen organisasi harus mengurangi dorongan dan keinginan yang dapat menyebabkan aparat melakukan tindakan yang buruk					
4	Merasa masalah yang terjadi di dalam organisasi adalah masalah saya juga					
5	Organisasi lebih mempertimbangkan komitmen yang sudah di bangun sejak awal dari pada pilihan yang ada					
6	Berkeinginan tetap tinggal karena kebutuhan gaji					
7	Sangat sulit mendapatkan pekerjaan jika saya keluar dari organisasi					
8	Sadar bahwa komitmen adalah hal yang harus saya lakukan					

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

KOMPETENSI APARAT PEMERINTAH (X4)

No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Pegawai harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan nya					
2	Kemampuan memberikan ide atau gagasan dalam forum/rapat					
3	Kemampuan menyelesaikan pekerjaan rutin secara mandiri					
4	Peningkatan pendidikan serta pelatihan di perlukan dalam sebuah kompetensi bagi aparat pemerintah					
5	Kemampuan penyajian laporan yang baik di pengaruhi oleh tingkat pendidikan formal seorang pegawai					

KEPATUHAN TERHADAP REGULASI (X5)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Program dan kegiatan aparat pemerintah bertujuan untuk memastikan hasil kerja konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan					
2	Dalam pembuatan laporan keuangan, instansi pemerintah telah menggunakan prosedur PP No.8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.					
3	Dalam pembuatan laporan akhir tahun instansi pemerintah menyajikan laporan tersebut secara berkala					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (Y)

No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Ada keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program kerja dan kebijakan					
2	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin					
3	Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategic organisasi/pemerintahan					
4	Indicator kinerja perlu di tetapkan untuk setiap kegiatan/program					
5	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program yang selesai dilaksanakan					
6	Melakukan pengecakan terhadap jalannya program					
7	Pelaksanaan kegiatan di control dengan ukuran dan indicator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan					

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jonnaisi, SH. MH  
 Jabatan : Kepala Dinas  
 Nama Instansi : Dinas Koperasi UKM  
 Alamat : Jl. Pertanian Bengkalis

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Levi Savila  
 NIM : 11770323444  
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Akuntansi  
 Universitas : UIN Suska Riau

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi dan menyebarkan kuesioner yang berjudul "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Dan Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( Studi Empiris pada SKPD Kab.Bengkalis )" pada tanggal .....

Bengkalis,

2021

  
 (Jonnaisi, SH. MH)





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ruslan, SH. MH  
 Jabatan : Sekrefaris  
 Nama Instansi : Dinas Perdagangan Dan perindustrian  
 Alamat : Jl. Pertanian

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Levi Savila  
 NIM : 11770323444  
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Akuntansi  
 Universitas : UIN Suska Riau

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi dan menyebarkan kuesioner yang berjudul "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Dan Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( Studi Empiris pada SKPD Kab.Bengkalis )" pada tanggal 5 Juli 2021

Bengkalis, 5 Juli 2021





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : FAHRIZAL, SSTP  
 Jabatan : Sekretaris  
 Nama Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu  
 Alamat : Jl. Antara

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Levi Savila  
 NIM : 11770323444  
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Akuntansi  
 Universitas : UIN Suska Riau

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi dan menyebarkan kuesioner yang berjudul "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Dan Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( Studi Empiris pada SKPD Kab.Bengkalis )" pada tanggal 30 JUNI 2021.

Bengkalis, 30 Juni 2021

DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BENGKALIS  
 SEKRETARIS  
 (FAHRIZAL, SSTP.....)



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2930/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 14 Juni 2021 M  
4 Zulqaidah 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

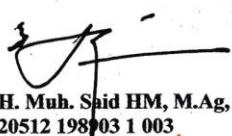
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Levi Savila  
NIM. : 11770323444  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Pengaruh System Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi,  
Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah, Dan Kepatuhan  
Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi Empiris Pada  
Skpd Kab. Bengkalis)"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan  
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198703 1 003

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712  
No. Telp/Fax : (0766) 22615 e-mail : info@dpmpsp.bengkalis.go.id Website : dpmpsp.bengkalis.go.id

Nomor : 061/DPMPSTP-JU/VI/2021/466  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi

Bengkalis, 28 Juni 2021  
Kepada :  
Yth. Seluruh OPD Kabupaten Bengkalis  
di -

Tempat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41852 tanggal 17 Juni 2021 perihal Mohon Rekomendasi Penelitian, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : LEVI SAVILA  
Alamat : Jl. Pemuda Kp.Jawa RT.002 RW. 002 Kelurahan Batu Panjang Kecamatan Rupat  
NIM : 11770323444  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Program Studi : Akuntansi  
Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/pras riset dalam rangka :

1. Judul :  
"Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparat Pemerintah Dan Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Bengkalis )".
2. Lokasi Penelitian :  
Seluruh OPD Kabupaten Bengkalis.
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada tanggal : 28 Juni 2021

a.n. BUPATI BENGKALIS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS,



**BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala DPMPSTP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau;
4. Yang Bersangkutan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR/E



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/CPMPTSP/NON IZIN-RISSET/41852  
 TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.64.02.91

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F.VII/PP.00.9/2930/2021** Tanggal **14 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

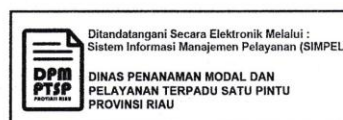
- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : LEVI SAVILA   |
| 2. NIM / KTP         | : 11770323444   |
| 3. Program Studi     | : AKUNTANSI   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI, KOMPETENSI APARAT PEMERINTAH, DAN KEPATUHAN REGULASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA SKPD KABUPATEN BENGKALIS) |
| 7. Lokasi Penelitian | : SELURUH OPD KABUPATEN BENGKALIS   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 17 Juni 2021



#### Terselamatkan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan